



**PREFERENSI POLITIK ANGGOTA DEWAN PENGURUS
DAERAH PAGUYUBAN KELUARGA BESAR
PUJAKESUMA PADANG SIDEMPUAN
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR
SUMATERA UTARA
TAHUN 2018**

SKRIPSI

*Ditulis untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (Sh.)*

Oleh :

**NURHAYANI POHAN
NIM. 18 103 00037**

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH
ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2023**



**PREFERENSI POLITIK ANGGOTA DEWAN PENGURUS
DAERAH PAGUYUBAN KELUARGA BESAR
PUJAKESUMA PADANG SIDEMPUAN
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR
SUMATERA UTARA
TAHUN 2018**

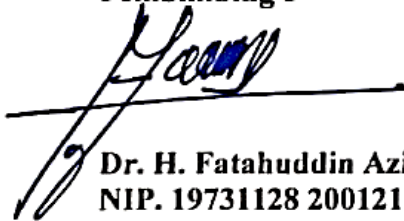
SKRIPSI

*Ditulis untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (SH.)*

Oleh:

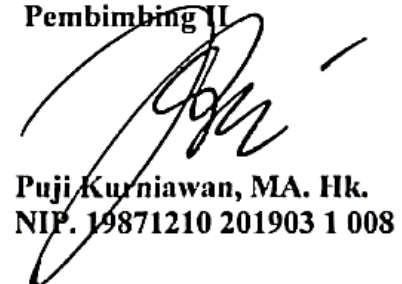
NURHAYANI POHAN
NIM: 1810300037

Pembimbing I



Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP. 19731128 200121 1 001

Pembimbing II



Puji Kurniawan, MA. Hk.
NIP. 19871210 201903 1 008

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH
ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANG SIDEMPUAN
2023**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahad.ac.id

Hal: Skripsi
A.n. Nurhayani Pohan

Padangsidimpuan 2 Januari 2023
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
UIN SYAHADA Padangsidimpuan
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi Nurhayani Pohan berjudul "Preferensi Politik Dewan Pengurus Daerah Paguyuban Keluarga Besar Pujakesuma Padang Sidempuan Dalam Pemilihan Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018.". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Tata Negara pada Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan,semoga dapat memaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

PEMBIMBING II

Puji Kurniawan, MA, Hk.
NIP. 19871210 201903 1 008

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nurhayani Pohan

NIM : 1810300037

Fakultas/ Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Preferensi Politik Dewan Pengurus Daerah
Paguyuban Keluarga Besar Pujakesuma Padang
Sidempuan Dalam Pemilihan Gubernur Sumatera
Utara Tahun 2018.

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidimpuan, 12 Januari 2023



Nurhayani Pohan
NIM. 1810300037

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurhayani Pohan
Nim : 1810300037
Jurusan : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul "*Preferensi Politik Dewan Pengurus Daerah Paguyuban Keluarga Besar Pujakesuma Padang Sidempuan Dalam Pemilihan Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018*". Dengan Hak Bebas Royaltitas *Non Eksklusif* ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/ memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan
Pada tanggal, 12 Januari 2023
Yang Menyatakan,



Nurhayani Pohan
1810300037


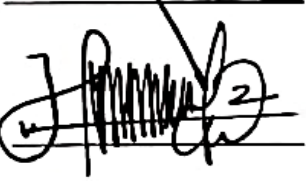
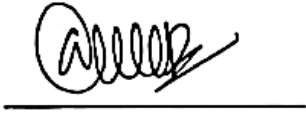



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIKINDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahad.ac.id

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : Nurhayani Pohan
Nim : 1810300037
Judul Skripsi : Preferensi Politik Anggota DPD PKB (Paguyuban Keluarga Besar)
Pujakesuma Padang Sidempuan Dalam Pemilihan Gubernur
Sumatera Utara Tahun 2018.

No.	Nama	Tanda Tangan
1.	<u>Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag</u> (Ketua/Penguji Bidang Metodologi)	
2.	<u>Dr. Zul Anwar Azim Harahap, M.Ag</u> (Sekretaris/ Penguji Bidang Isi dan Bahasa)	
3.	<u>Hendra Gunawan, M.A</u> (Anggota/Penguji Bidang Umum)	
4.	Agutina Damanik, M.A (Anggota/Penguji Bidang Siyasah/ Ketatanegaraan)	

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah;

Di : Padangsidempuan
Tanggal : 18 Januari 2023
Pukul : 14.00 WIB s.d Selesai
Hasil/Nilai : 80 (A)
Indeks Prestasi Kumulatif : 3, 62
Predikat : Pujian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximlle (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahada.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: 245 /Un. 28/D.I/PP.00.9/02/2023

Judul Skripsi : Preferensi Politik Anggota Dewan Pengurus Daerah
Paguyuban Keluarga Besar Pujakesuma Padang Sidempuan
Dalam Pemilihan Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018.
Ditulis Oleh : Nurhayani Pohan
Nim : 18 103 00037

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H)



Padangsidempuan, 20 Februari 2023

Dekan,

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag

NIP: 19731128 200112 1 001

Abstrak

Nama : Nurhayani Pohan
Nim : 1810300037
Judul : **Preferensi Politik Anggota Dewan Pengurus Daerah Paguyuban Keluarga Besar Pujakesuma Padang Sidempuan Dalam Pemilihan Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018**
Tahun : 2023

Pemilihan Kepala Daerah di Provinsi Sumatera Utara tidak terlepas dari masalah Politik identitas. Pada umumnya politisi menggunakan kesempatan identitas untuk mendapatkan dukungan suara agar bisa menduduki jabatan politik tersebut. Namun konflik antar identitas di ranah politik biasanya tidak dilakukan secara terang-terangan ataupun terbuka. Umumnya rakyat lebih cenderung memilih kandidat bersamaan dengan identitas mereka sendiri.

Dari permasalahan tersebut penulis ingin mengetahui Bagaimana preferensi politik Pujakesuma di Padang Sidempuan dalam pemilihan Gubernur Sumatera Utara tahun 2018 dan Faktor-faktor apa saja yang menjadi pertimbangan Pujakesuma dalam menentukan dukungannya pada Pemilihan Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field Research*) dengan menggunakan pendekatan Hukum Normatif Empiris. Adapun sumber data penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder. Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung oleh peneliti dari sumbernya yaitu ketua organisasi Pujakesuma, anggota Pujakesuma, dan masyarakat Jawa yang tidak masuk kedalam organisasi Pujakesuma, dan Sumber data sekunder yaitu Buku-buku, data, jurnal dan dokumen. Teknik pengumpulan data yang digunakan terdiri dari wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang dilakukan peneliti adalah analisis deskriptif kualitatif.

Pada Pemilihan Gubernur Sumatera Utara tahun 2018 secara organisasi Paguyuban Pujakesuma cenderung kepada pasangan Djarot Saipul Hidayat dengan Sihar Sitorus. Namun uniknya pengurus organisasi Pujakesuma tidak menekankan anggotanya untuk memilih pasangan Djarot Saipul Hidayat dengan Sihar Sitorus. Sehingga ditemukan anggota Pujakesuma yang tidak memilih calon pasangan tersebut. Hal ini dikarenakan organisasi Pujakesuma di Padang Sidempuan masih berlandaskan asas-asas dalam Pemilihan Kepala Daerah yaitu asas bebas. Dalam artian bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun. Organisasi Pujakesuma memilih pasangan Djarot Saipul Hidayat dengan Sihar Sitorus disebabkan beberapa faktor. Diantaranya secara organisasi Pujakesuma lebih mengutamakan sesama etnis Jawa. Disamping itu ada kontrak politik antara pasangan calon Gubernur dengan Pujakesuma yaitu menjanjikan dan membuat komitmen apabila mereka menduduki kursi pada pemilihan Gubernur Sumatera Utara tahun 2018 mereka akan memajukan Organisasi Pujakesuma Khususnya di Provinsi Sumatera Utara.

Kata Kunci: Politik, Pujakesuma, Preferensi

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala yang telah memberikan waktu dan kesehatan dan kepada penulis untuk melakukan penelitian dan menuangkannya dalam skripsi ini. Sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun Umatnya kejalan yang benar. Skripsi ini berjudul **“Preferensi Politik Anggota Dewan Pengurus Daerah Paguyuban Keluarga Besar Pujakesuma Padang Sidempuan Dalam Pemilihan Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018”**. Ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum (UIN SYAHADA) Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad'dary Padang Sidempuan. Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kata sempurna, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti berterimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag selaku Rektor UIN Syahada Padang Sidempuan, Bapak Dr. Erawadi, M.Ag selaku Wakil Rektor I bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A selaku Wakil Rektor II Bidang administrasi

umum dan perencanaan keuangan, dan Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan kerjasama beserta seluruh civitas akademika UIN Syahada Padang Sidempuan yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama dalam proses perkuliahan.

2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Bapak Dr. Ahmatnizar M.Ag selaku wakil Dekan I Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Ibu Dra. Asnah, M.Ag selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Zul Anwar Azim Harahap M.Ag selaku Wakil Dekan bidang Kemahasiswaan dan kerjasama.
3. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag selaku Pembimbing I dan Bapak Puji Kurniawan MA, Hk selaku Pembimbing II telah menyempatkan waktunya untuk menelaah dari Bab per Bab dalam pembuatan skripsi ini serta membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Dermina Dalimunthe, M.H selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Syahada Padangsidempuan, Bapak Khoiruddin Manahan Siregar, M.H selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

5. Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag selaku Dosen Penasihat Akademik dan Seluruh Bapak /Ibu Dosen di lingkungan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary.
6. Bapak kepala perpustakaan dan seluruh pegawai perpustakaan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah membantu penulisan dalam menyediakan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.
7. Teristimewa kepada Ayahanda tercinta Almarhum Barhamsyah Pohan dan Ibunda tersayang Asmah Simamora yang telah menyayangi dan mengasahi sejak kecil, senantiasa memberikan do'a disetiap waktu, selalu menyemangati penulis disaat jatuh, memberikan nasehat, motivasi yang baik dan moral maupun materil dalam setiap langkah hidup penulis.
8. Sehat Azhari Pohan dan Ahmad Rifaldi Pohan selaku Abang Kandung yang memberikan support baik maupun materil disetiap proses pendidikan penulis, Rudi Ariansyah Pohan selaku adik Kandung yang selalu memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini. Serta semua pihak keluarga besar yang telah memberikan dukungan serta do'a.
9. Teruntuk Kanda Perdian Roy Aldoni Harahap, Terimakasih telah membantu serta memberikan motivasi baik berupa bantuan waktu

dan fikiran terhadap peneliti dalam menyelesaikan dari tahap awal Proposal sampai dengan penelitian Skripsi ini.

10. Kepada teman-teman seperjuanganku di kelas Hukum Tata Negara 2, Nurul Annisyah, Siti Nurhaliza, Dina yanti, Abdurrahman, Junaidi Usman, Linda Sihotang, Hamzah, Indra Wandu, Rita Annisyah, Pitriana, Erlita Molida, Siti Rafiah, Sri Wahyuni, Alimin Paldi, dan Khairil Ikhsan dan juga teman-temanku di kelas HTN 1 dan HTN 2 yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, Terimakasih saya ucapkan atas dukungan, motivasi, serta saran yang kalian berikan kepada saya selaku penulis.
11. Terkhusus sahabat-sahabatku Wilma Putri Handayani, Dinda Rahma Puspita, Winna Maysarah, Yana Restika, terimakasih telah menemani dan memberikan dukungan selama ini.
12. Terimakasih atas bantuan dan kerjasama semua pihak yang telah membantu dan menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Disini penulis mengucapkan rasa syukur kepada Allah Swt, karena atas karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan penulis. Aamiin ya Robbalalamin.

Penulis menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada diri penulis. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis sangat

mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya kepada Allah penulis berserah diri atas segala usaha dan do'a dalam penyusunan skripsi ini. Semoga tulisan ini memberikan manfaat bagi kita semua.

Padang Sidempuan, Januari 2023

Penulis

Nurhayani Pohan
NIM: 1810300037

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf Latin.




Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	ḏal	ḏ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	S (dengan titik di bawah)
ض	ḏad	ḏ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	„ain	„	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..''..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	ḍommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	fathah dan ya	Ai	a dan i
و.....	fathah dan wau	Au	a dan u

- c. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا.....	fathah dan alif atau ya	–	a dan garis atas
ى.....	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
و.....	ḍommah dan wau	ū	u dan garis di atas

d. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua.

- Ta Marbutah hidup yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan ḍommah, transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

e. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ال. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

g. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

h. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

i. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

j. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL/SAMPUL	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PEMBIMBING	
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
DEWAN PENGUJI SIDANG MUNAQASYAH	
PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Masalah.....	8
C. Batasan Istilah	8
D. Rumusan Masalah	9
E. Tujuan Penelitian.....	9
F. Kegunaan Penelitian.....	10
G. Tinjauan Pustaka	10
H. Sistematika Pembahasan	15
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pengertian Preferensi Politik.....	16
B. Budaya Politik.....	17
C. Pemilihan Kepala Daerah.....	22
D. Demokrasi	29
E. Kepemimpinan Menurut Pandangan Islam	33
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Lokasi Dan Waktu Penelitian	38
B. Subjek Penelitian.....	38
C. Jenis Penelitian	39
D. Jenis Data Penelitian	39
E. Tehnik Pengumpulan Data	40
F. Tehnik Pengolahan Data	41
G. Analisis Data	42
H. Tehnik Uji Keabsahan Data	42
BAB IV HASIL PENELITIAN	

A. Gambaran Umum Tempat Penelitian	45
1. Sejarah Kota Padang Sidempuan	45
2. Sejarah Lahirnya Paguyuban Pujakesuma	47
3. Visi Misi Pujakesuma Padang Sidempuan	54
B. Temuan Khusus Hasil Penelitian	55
1. Preferensi Politik Anggota Pujakesuma di Padang Sidempuan dalam pemilihan Gubernur Sumatera Utara tahun 2018	55
2. Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan Pujakesuma dalam mendukung pasangan calon Djarot Syaiful Hidayat dengan Sihar Sitorus	58
3. Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Preferensi Politik Pujakesuma di Padang Sidempuan Dalam Pemilihan Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018	61

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	67
B. Saran.....	68

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Preferensi politik merupakan sikap pemilihan dalam menentukan pilihan politiknya dalam Pemilihan Umum maupun Pemilihan kepala daerah. Preferensi politik sering juga disebut sebagai pilihan tindakan yang berdasarkan nilai-nilai yang diyakini untuk memberikan respon politik yang ada pada diri seseorang. Prinsip ini diambil dari sebuah pandangan mendasar tentang persepsi, kognisi, dan aksi, dimana manusia merupakan makhluk sosial. Saat individu atau seseorang berinteraksi dan mengantisipasi interaksi, masing-masing individu mempengaruhi apa yang akan dipikirkan, dinilai dan dilakukan individualnya.¹

Pemilihan kepala daerah atau yang sering disebut dengan (Pilkada) merupakan sebuah pesta rakyat yang sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Yang mana Pemilihan kepala daerah ini akan menghasilkan pemimpin yang baru dan menghasilkan pemerintahan yang baru juga. Masyarakat sendiri mempunyai peran yang sangat penting dalam pemilihan kepala daerah, karena di dalam demokrasi pemimpin dipilih langsung oleh rakyat baik secara langsung maupun tidak langsung. Setiap masyarakat berhak untuk menentukan pemimpin mana yang akan ia pilih, karena setiap diri seseorang mempunyai respon politik yang berbeda yang disebut dengan Preferensi politik.

¹Sudjono Sastroatmodjo, *Perilaku Politik* (Semarang: IKIP Semarang Press, 1995), hlm. 37.

Preferensi politik dibangun atas dasar standard penilaian terhadap seorang calon maupun partai politik, dan juga dibangun atas dasar karakteristik lingkungan sosial yang mana individu itu sendiri berinteraksi agar dapat memahami kecenderungan respon politik yang akan diberikan oleh seseorang.

Tindakan politik menjadi sebuah faktor yang sangat menentukan untuk mengarahkan dan merespon situasi politik yang dihadapi oleh seseorang. Tindakan politik tersebut tergantung pada nilai-nilai apa yang muncul dalam dirinya pada saat itu karena bentuk tindakan politik yang dilakukan seseorang tidak ada yang sama antara yang satu dengan yang lain.

Di area perpolitikan, Pemilihan kepala daerah sering menjadi sasaran utama antar kekuatan sosial dan politik yang tidak jarang dikaitkan dengan suku, ras, dan agama. Pemilihan kepala daerah serentak pertama kali diadakan pada tahun 2004 yang mana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pasal 56 Nomor 119 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 06 Tahun 2005 tentang cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala daerah. Tujuan pemilihan Kepala daerah untuk memilih pemimpin daerah sesuai dengan Demokrasi demi menjalankan kekuasaan otonomi ditingkat daerah.

Pemilihan kepala daerah serentak yang diadakan pada tahun 2018 di Provinsi Sumatera Utara menjadi salah satu pusat perhatian dikarenakan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara diikuti oleh

dua pasangan kandidat yang memenuhi syarat dari KPU.² Pasangan calon Gubernur Dan Wakil Gubernur ialah pasangan Edy Rahmayadi dengan Musa Rejek Shah yang disapa dengan (Eramas) dan pasangan Djarot Saiful Hidayat dengan Sihar Sitorus yang disebut dengan (Djoss). Mereka merupakan pasangan calon gubernur yang bersaing untuk menduduki kursi tertinggi di Sumatera Utara.

Latar belakang diantara kedua calon kandidat sedikit banyaknya pasti mempunyai perbedaan. Adapun perbedaan yang paling mendasar yang dapat dilihat diantaranya perbedaan Etnis dan Agama. Pasangan Edy Rahmayadi dengan Musa Rajek Shah yang berasal dari provinsi Sumatera Utara yang mana Edy Rahmayadi sendiri bersuku Melayu sedangkan Musa Rejek Shah merupakan putra daerah Sumatera Utara dan keduanya beragama Islam. Sedangkan pasangan (Djoos) yaitu Djarot saiful hidayat berasal dari Jawa Tengah dan seorang politisi yang pernah menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2017 dan suku Jawa sedangkan Sihar Sitorus merupakan politikus sekaligus putra daerah dan beragama Non-muslim yang bersuku Batak Toba.

Konflik antar identitas di ranah politik memang tidak terang-terangan ataupun terbuka, tetapi konflik identitas ini sering kali dijadikan sebagai kesempatan politik bagi kaum politisi. Para politisi menggunakan identitas untuk mendapatkan dukungan suara yang menjadi syarat untuk

²Maghfira Faraidiany, Heri Kusmanto dan Warjio, "Politik Identitas dalam Iklan Politik dalam Pemilihan Kepala Daerah Sumatera Utara 2018", *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu sosial*, Vol. 11 No 1, tahun 2019, hlm. 114.

menduduki jabatan politik. Umumnya rakyat lebih cenderung memilih kandidat bersamaan dengan identitas mereka sendiri.

Kasus Pemilihan Kepala Daerah di Sumatera Utara tahun 2018 dukungan diperebutkan oleh para politisi dikelompokkan berasal dari Etnis Jawa dan Umat muslim sebagai mayoritas di Sumatera Utara. Jumlah penduduk Sumatera Utara pada tahun 2021 sebanyak 15.136.522 jiwa yang terdiri dari beberapa Agama dan Etnis. Penduduk Sumatera Utara menganut berbagai macam Agama, seperti Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghuchu. Serta terdiri dari beberapa etnis, yaitu etnis Batak termasuk (Karo, Toba, Mandailing, dan Pakpak), etnis Jawa, etnis Melayu, etnis Tionghoa, dan etnis Aceh, Sunda, maupun Minangkabau.³

Berdasarkan jumlah penduduk Sumatera Utara yang rata-rata masyarakatnya beragama Islam yang populasinya 9.425.734 jiwa dan masyarakat Jawa menduduki posisi suku ke-dua yang paling banyak dianut di Sumatera utara berdasarkan hasil sensus yang dilakukan oleh BPS (Badan Pusat Statistik) yang populasinya 4.309.719 jiwa.⁴ Dilihat secara kuantitatif, data tersebut menjadikan dua kelompok identitas sebagai dukungan suara untuk kedua kandidat.

³Dharma kelana putra, "Relevansi politik identitas pemilih muslim dalam pemilihan guberbur sumatera utara tahun 2018", *Jurnal antropologi: isi-isu sosial budaya*, Vol. 21 No. 02, Tahun 2019, hlm. 237.

⁴BPS Provinsi Sumatera Utara, *Provinsi Sumatera dalam Angka* (Medan : CV Rilis Grafika, 2019), hlm. 65.

Etnis Jawa terdiri dari dua kata yaitu etnis dan Jawa. Kata etnis berasal dari bahasa Yunani, yaitu *ethnos* yang artinya sebagai bangsa atau suatu perkumpulan manusia yang mempunyai bahasa dan kebudayaan yang sama pada esensinya kelompok etnis itu didasarkan pada keyakinan subjektif tentang suatu kelompok bersama.⁵ Sedangkan Jawa merupakan salah satu suku yang ada di Indonesia yang terletak di pulau Jawa dan menggunakan bahasa Jawa sebagai bahasa sehari-hari.⁶

Media sosial mengamati bahwa politik identitas mewarnai persaingan yang terjadi di Sumatera Utara. Pasangan Edy Rahmayadi dengan Musa Rajekshah lebih cenderung agar umat Islam lebih memilih calon pemimpin yang beragama Islam agar pemimpin tersebut mau memperjuangkan agama Islam. Sedangkan pasangan Djarot saiful hidayat dengan Sihar Sitorus menyampaikan kepada masyarakat agar tidak menjadikan perbedaan antara identitas Agama maupun etnis dalam pemilihan pemimpin. Disisi lain, para pendukung Djarot saiful hidayat dengan Sihar Sitorus memanfaatkan latar belakang diantara keduanya yang beridentitas suku Jawa dan Suku batak⁷ yang sebagian besar beragama non muslim agar mendapatkan dukungan dari kedua suku tersebut.

⁵Ishiyama J dan Marijeke Breuning, *Ilmu Politik Dalam Paradigma Abad Ke-21 jilid 1* (Jakarta: Kencana prenada media group, 2013), hlm. 361.

⁶Fran Magniz suseno, *Etika Jawa Sebuah Analisa Falsafi Tentang Kebijakan Hidup Orang Jawa* (Jakarta: PT.Gramedia pustaka utama, 1985), hlm. 11.

⁷<https://medan.tribunnews.com/2018/05/23/persaudaraan-jawa-bataktegaskanmenangkan-djarot-sihar>

Salah satu kelompok etnik identitas di Sumatera Utara bersuku Jawa mempunyai Organisasi Masyarakat yaitu Paguyuban etnis Jawa yang disebut dengan “Pujakesuma”. Nama Pujakesuma berawal pada saat adanya pertemuan sederhana yang setiap malamnya diadakan disalah satu rumah Letkol (CPM) Danu Soewarso. Dirumah tersebut secara rutin berkumpul beberapa orang keturunan Jawa di Sumatera. Pertemuan biasanya melakukan sarasehan dan renungan. Waktu pertemuan juga dicari malam yang khusus seperti malam Selasa Kliwon. Diteras rumah Letkol Danu Soewarso, secara kebetulan mekar bunga wijaya kesuma yang tumbuh dihalaman rumah. Bunga tersebut mempunyai keunikan dan kebiasaan, bunga tersebut hanya mekar setelah lewat tengah malam hari. Melihat bunga tersebut para keturunan Jawa yang berada dilokasi pada saat itu menggagas nama “PUJAKESUMA” untuk dijadikan sebagai nama Paguyuban yang bertujuan meningkatkan martabat keturunan orang Jawa.

Pujakesuma ini didirikan oleh H. Mas Sukardi pada tanggal 10 Juli 1980. Kumpulan Pujakesuma di Sumatera Utara menganut ajaran Ki Hajar Dewantara yang sudah memberikan contoh menghilangkan gelar bangsawan agar terjalin hubungan antar sesama kaum. Adapun tujuan Pujakesuma didirikan untuk melestarikan budaya leluhur yang berasal dari Jawa di Sumatera. Contohnya kesenian rakyat tradisional Jawa seperti kuda lumping, wayang golek, wayang kulit dan lain-lain. Dan makanan khas Jawa seperti ketoprak.

Kelompok Pujakesuma tersebar luas diseluruh daerah, termasuk di Padang Sidempuan. Melihat pemilihan kepala daerah di Sumatera Utara, Kota Padang Sidempuan ikut berperan dalam Pemilihan kepala daerah tersebut. Pemilihan kepala daerah Gubernur Sumatera Utara dilakukan pada tanggal 27 juni 2018 yang mana semua masyarakat berhak untuk memilih secara langsung.

Keunikan yang menarik disini sebelum dilakukannya Pemilihan kepala daerah Sumatera Utara, DPD Pujakesuma Padang Sidempuan memberikan dukungan terhadap Djarot Saiful Hidayat dengan Sihar Sitorus yang mana Djarot saiful hidayat merupakan dari kalangan etnis Jawa. Adapun tataran ideal paguyuban memiliki peran penting sebagai pemersatu sesama etnis Jawa dan wadah bagi etnis tersebut untuk saling berbagi. Oleh karena itu organisasi DPD Paguyuban Keluarga Besar Pujakesuma Padang Sidempuan lebih berpihak pada pasangan Djarot Saiful Hidayat dengan Sihar Sitorus dengan alasan sesama etnis Jawa.

Kenyataan ini membuat peneliti tertarik untuk lebih memahami dan mengetahui tentang etnis Jawa dalam kelompok Pujakesuma dalam menyikapi pilihan politiknya terhadap salah satu calon kandidat di dalam Pemilihan kepala daerah Sumatera utara tahun 2018. Melihat bahwa pilkada merupakan masalah penting yang menyangkut kehidupan masyarakat, yang mana pilihan masyarakat menjadi penentu dalam masa depan suatu daerah tersebut maka karena itu peneliti berusaha membuat penelitian ilmiah dengan judul **“PREFERENSI POLITIK ANGGOTA**

PUJAKESUMA DPD PADANG SIDEMPUAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TAHUN 2018”.

B. Fokus Masalah

Dilihat adanya permasalahan yang telah dipaparkan di dalam latar belakang masalah dan sudah teridentifikasi meskipun tidak keseluruhan, maka disini peneliti membatasi permasalahan agar peneliti lebih terfokus, terperinci, dan sistematis.

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti terfokus pada permasalahan bagaimana peran Pujakesuma di Padang Sidempuan menyikapi pilihan politiknya dalam Pemilihan kepala daerah Gubernur Sumatera utara tahun 2018.

C. Batasan Istilah

Untuk menghindari kekeliruan dalam memahami judul yang terdapat dalam penelitian ini, maka peneliti perlu menjelaskan istilah-istilah dalam judul penelitian ini, sebagai berikut :

1. Preferensi

Preferensi menurut KBBI (kamus besar bahasa Indonesia) ialah hak untuk didahulukan dan diutamakan dari pada yang lain, pilihan, kecenderungan, dan kesukaan.

2. Politik

Secara etimologis politik berasal dari bahasa Yunani yaitu polis. Polis berarti kota yang berstatus Negara kota. Pengertian politik yang berkembang di Yunani dapat ditafsirkan sebagai suatu proses interaksi

antara individu dengan individu lainnya demi mencapai kebaikan bersama. Menurut KBBI, politik adalah pengetahuan mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan seperti tentang sistem pemerintahan, dasar pemerintahan.

3. Pilkada

Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah), adalah pemilihan yang dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah administratif setempat yang telah memenuhi persyaratan.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka penulis dapat merumuskan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian, yaitu adalah:

1. Bagaimana preferensi politik anggota DPD PKB Pujakesuma Padang Sidempuan dalam pemilihan Gubernur Sumatera Utara tahun 2018?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi pertimbangan Pujakesuma dalam menentukan dukungan pada pemilihan Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018?

E. Tujuan penelitian

Adapun tujuan dari penulisan peneilitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Agar teridentifikasi bagaimana preferensi politik yang dilakukan Organisasi Pujakesuma DPD Padang Sidempuan dalam pemilihan Gubernur Sumatera Utara tahun 2018.

2. Agar memahami faktor-faktor apa saja yang menjadi pertimbangan Pujakesuma dalam menentukan dukungan pada pemilihan Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018

F. Kegunaan Penelitian

Sebuah penelitian diharapkan mampu memberikan manfaat yang berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan baik dibidang penelitian maupun praktiknya. Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan dan pengetahuan dibidang ilmu Hukum.
2. Diharapkan dapat menjadi rujukan bagi peneliti-peneliti selanjutnya.
3. Menambah khazanah ilmu pengetahuan kepustakaan Universitas Islam Negeri Syarif Hasan Ahmad Ad-Darry Padang Sidempuan khususnya bagi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.
4. Kegunaan penelitian ini merupakan syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.

G. Tinjauan Pustaka

Untuk menemukan pembahasan dalam penelitian terdahulu, penulis melakukan penelitian dan penelusuran dengan beberapa tulisan yang berkaitan untuk menguji hasil penelitian ini. Walaupun kajian mengenai judul peneliti pada saat ini yaitu “Preferensi Politik Anggota Pujakesuma DPD Padang Sidempuan Dalam Pemilihan Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018” belum terlalu banyak yang meneliti ataupun

yang menulis. Namun terdapat beberapa tulisan berupa skripsi, tesis, maupun jurnal yang dapat menjadi sumber rujukan bagi peneliti untuk membandingkan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan peneliti lakukan, diantaranya:

1. Wahyu wiji utomo, Institut Agama Islam Negeri Sumatera utara dengan judul “*Budaya Politik Dalam Etnis Jawa (Studi Kasus Peran Pujakesuma Dalam Pilkada Kabupaten Langkat Pada Tahun 2013)*”. Dalam skripsi ini dapat disimpulkan bahwa masyarakat yang berada di kabupaten langkat mayoritasnya bersuku etnis jawa. Walaupun demikian tidak menjadikan kepala daerah yang terpilih pada tahun 2013 beretnis Jawa, melainkan dari etnis Karo.⁸ Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan tehnik pengumpulan data, wawancara dan observasi.

Kaitannya dengan penelitian ini yaitu kesamaan pembahas terkait dengan peran Organisasi Pujakesuma dalam pemilihan kepala daerah serta pertimbangan apa saja yang menjadi landasan Pujakesuma untuk mendukung salah satu calon kepala daerah. Namun juga memiliki perbedaan meliputi tempat dan fokus masalah penelitian. Penelitian ini dilakukan dikota Langkat pada tahun 2013, sedangkan penelitian skripsi ini dilakukan di Padang Sidempuan tahun 2022.

⁸ Wahyu wiji utomo, “Budaya Politik dalam Etnis Jawa (Studi Kasus Peran Pujakesuma dalam Pilkada Kabupaten Langkat pada Tahun 2013”, *Skripsi* (Medan: Institut Agama Islam Negeri Medan, 2014), hlm. iv.

2. Skripsi Junaidi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dengan judul “*Perilaku Komunikasi Etnis Jawa dalam Kehidupan Sosial dan Kehidupan Politik di kota Medan*”. Dalam skripsi tersebut disimpulkan bahwa komunikasi etnis Jawa dalam perpolitikan dilandasi oleh agama, ekonomi, kompetensi, dan komitmen terhadap janji. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Digunakan pendekatan kualitatif karena untuk memahami fenomena apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan.⁹

Kaitannya dengan penelitian ini yaitu kesamaan dalam perilaku etnis jawa dalam berpolitik. Namun memiliki perbedaan terkait tempat dan fokus masalah penelitian. Penelitian ini lebih terfokus kepada bagaimana komunikasi etnis jawa dalam kehidupan sosial dan kehidupan politik dan penelitian ini dilakukan di kota Medan. Sedangkan skripsi ini lebih terfokus pada preferensi politik Pujakesuma dalam Pemilihan Gubernur Sumatera Utara dan penelitian ini dilakukan di Padang Sidempuan.

3. Skripsi Dani Syahpani, Universitas Sumatera Utara Fakultas Antropologi dengan judul “*Makna Pemimpin Menurut Orang Jawa (Studi Deskriptif Pada Paguyuban Pujakesuma)*”.¹⁰ Dalam skripsi tersebut menyimpulkan bahwa pemimpin di dalam peguyuban

⁹ Junaidi, “Perilaku Komunikasi Etnis Jawa dalam Kehidupan Sosial dan Kehidupan Politik di kota Medan”, *Skripsi* (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara)

¹⁰Dani Syahpani, “Makna Pemimpin Menurut Orang Jawa (Studi Deskriptif Pada Paguyuban Pujakesuma)”, *Skripsi* (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2009), hlm. iv.

Pujakesuma tidaklah hanya sebatas pemimpin yang formal, artinya bahwa masih ada orang yang dianggap lebih memiliki wewenang dan pengambil keputusan di dalam Paguyuban Pujakesuma. Mereka adalah para sesepuh yang memiliki wewenang tentang sebuah keputusan, apakah sebuah tindakan atau pilihan itu harus diikuti atau tidak oleh para anggota paguyuban Pujakesuma. Karena para sesepuh lebih dianggap mempunyai sifat *manunggaling kawulo gusti* yang berarti pemimpin adalah titisan Tuhan.

Kaitannya dengan penelitian ini yaitu kesamaan dalam membahas mengenai pemimpin menurut orang Jawa khususnya pada Paguyuban Pujakesuma. Namun memiliki perbedaan terkait tempat dan fokus masalah. Penelitian ini lebih terfokus kepada makna seorang pemimpin menurut orang Jawa. Sedangkan skripsi ini lebih terfokus kepada preferensi politik Pujakesuma dalam pemilihan pemimpin Gubernur Sumatera utara tahun 2018.

4. Skripsi Dita Ardhina, Universitas Sumatera Utara dengan judul "*Gambaran Persepsi Terhadap Kepemimpinan Transformasional Pada Pimpinan Organisasi Pujakesuma Langkat*". Dalam skripsi tersebut menyimpulkan bahwa gambaran kepemimpinan transformasional pada pimpinan organisasi Pujakesuma Langkat berada pada kategori sedang yang artinya pimpinan Pujakesuma Langkat merupakan pimpinan yang mampu merubah Organisasi dengan anggotanya dalam merubah lingkungan kerja dengan cara

meningkatkan moralitas dan motivasi pada anggotanya serta menghargai dan mempertahankan kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh anggotanya sehingga anggota dapat mengoptimalkan kinerja untuk mencapai tujuan organisasi.

Kaitannya dengan penelitian ini yaitu kesamaan dalam organisasi Pujakesuma dalam melihat seorang pemimpin. Namun juga memiliki perbedaan terkait tempat dan fokus masalah. Penelitian ini dilakukan di kota Langkat dan hanya terfokus kepada persepsi terhadap kepemimpinan transformasional pada kepemimpinan Organisasi Pujakesuma. Sedangkan skripsi ini lebih menyebar luas yaitu mengenai preferensi politik pujakesuma dalam pemilihan gubernur Sumatera utara tahun 2018 dan penelitian ini dilakukan di Padang Sidempuan.

5. Tesis Misran Sihaloho, Fakultas program pascasarjana UNIMED tahun 2006 dengan judul "*Orientasi Pemilih Etnis Jawa Dalam Pildakasung Tahun 2005 Di kota Medan*". Dalam skripsi tersebut menyimpulkan bagaimana sikap dan pandangan politik etnis Jawa dalam menentukan calon Walikota dan wakil Walikota serta teknik-teknik apa saja yang dilakukan oleh kandidat calon Walikota dan wakil Walikota dalam mempengaruhi agar etnis Jawa tertarik untuk berpihak kepada pasangan calon Walikota tersebut.

Kaitannya dengan penelitian ini yaitu kesamaan dalam pandangan politik etnis Jawa dalam menentukan pemimpin. Tetapi juga memiliki

perbedaan terkait tempat dan fokus masalah. Penelitian ini lebih terfokus terhadap menentukan sikap ataupun arah pemilih etnis Jawa dalam Pilkada di kota medan. Sedangkan skripsi ini lebih terfokus kepada preferensi politik Pujakesuma dalam pemilihan Gubernur Sumatera utara, dan penelitian ini terletak di Padang Sidempuan.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika penelitian ini terdiri dari 4 (empat) bab yaitu sebagai berikut:

1. Bab I pendahuluan merupakan bab yang memberikan gambaran secara umum mengenai penelitian ini yang terdiri dari beberapa sub bab yaitu Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penelitian.
2. Bab II merupakan bab yang berisikan Landasan Teori yang terdiri dari Pengertian Preferensi Politik, Budaya politik Dalam Etnis Jawa, Pemilihan Kepala Daerah, Teori Demokrasi, dan Asal Usul Paguyuban Etnis Jawa.
3. Bab III merupakan Metode Penelitian yang terdiri dari Lokasi dan Waktu Penelitian, Subjek Penelitian, Jenis Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, dan Teknik Analisis Data.
4. Bab IV Pembahasan terkait Peran Organisasi Pujakesuma di kota Padang Sidempuan berpartisipasi dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah Gubernur Sumatera Utara.
5. Bab V yaitu Penutup terdiri dari kesimpulan dan Saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Preferensi politik

1. Pengertian Preferensi politik

Abdul Rahman Shaleh dan Muhib Abdul Wahab mendefinisikan preferensi merupakan suatu kecenderungan untuk memberikan perhatian kepada orang dan bertindak terhadap orang. Aktivitas atau situasi yang menjadi objek dari minat tersebut disertai dengan perasaan senang ataupun puas. Sedangkan menurut Andi Mappiare, preferensi merupakan suatu perangkat mental yang terdiri dari suatu campuran dari perasaan, harapan, pendirian, prasangka, rasa takut atau kecenderungan lain yang mengarahkan individu kepada suatu pilihan tertentu.¹¹

Preferensi politik merupakan suatu pilihan tindakan yang berdasarkan nilai-nilai yang diyakini untuk memberikan sebuah respon politik yang ada dalam diri seseorang. Preferensi politik ini didefinisikan juga sebagai penentuan sebuah pilihan dengan berbagai macam pertimbangan sesuai dengan nilai-nilai yang dibangunnya dalam menentukan standarisasi penilaian terhadap partai politik maupun calon pemimpin. Preferensi politik biasanya disebut juga dengan perilaku politik, maksud dari perilaku politik ialah:

¹¹Andi Mappiare, *Psikologi Orang Dewasa Bagi Penyesuaian Dan Pendidikan* (Surabaya: Usana Offsetprinting, 1994), hlm. 62.

- a. Melakukan pemilihan untuk memilih calon pemimpin wakil rakyat.
- b. Mengikuti dan berhak menjadi insan politik yang mengikuti suatu partai politik, mengikuti ormas ataupun LSM.
- c. Ikut serta dalam pesta politik
- d. Ikut mengkritik atau menurunkan para pelaku politik yang berotoritas
- e. Berhak menjadi calon pimpinan politik
- f. Berkewajiban untuk melakukan hak dan kewajibannya sebagai insan politik untuk melakukan perilaku politik yang telah disusun secara baik oleh konstitusi undang-undang dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹²

B. Budaya Politik dan Kepribadian Masyarakat Jawa

1. Pengertian Budaya Politik

Budaya politik merupakan bagian dari kebudayaan masyarakat dengan ciri-ciri yang lebih khas. Istilah budaya politik meliputi masalah legitimasi, pengaturan kekuasaan, proses pembuatan kebijakan pemerintah, kegiatan partai-partai politik, perilaku aparat Negara serta perilaku masyarakat seperti partisipasi dalam kegiatan politik, dan permasalahan masyarakat terhadap kekuasaan yang memerintah.

Lucian W. Pye mendefinisikan budaya politik sebagai "*the ordered subjective realism of politic*" yaitu tertib dunia subjektif

¹²Agus prasetya, "Preferensi Politik Pada Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) di Kota Madiun", *Jurnal pamator*, Vol. 11 No. 2, Tahun 2018, hlm. 14.

politik. Sedangkan Almond dan Verba mendefinisikan budaya politik sebagai “suatu sikap orientasi yang khas warga Negara terhadap sistem politik dan aneka ragam bagiannya, dan sikap terhadap peranan warga Negara yang ada didalam sistem tersebut”.

Miriam Budiardjo menyatakan bahwa budaya politik adalah keseluruhan dari pandangan-pandangan politik seperti norma-norma, pola-pola orientasi terhadap politik, dan pandangan hidup pada umumnya. Budaya politik mengutamakan dimensi psikologis dari suatu sistem politik yaitu sikap-sikap, sistem-sistem kepercayaan, symbol-simbol yang dimiliki oleh individu dan beroperasi di dalam masyarakat serta harapan-harapannya.

Menurut Arief Budiman, budaya politik merupakan suatu macam ide yang dianut bersama banyaknya anggota masyarakat, tidak hanya masalah-masalah politik tapi juga tentang aspek-aspek kehidupan dan perubahan masyarakat.¹³ Adapun perubahan yang dimaksud ialah perubahan teknis, perubahan dari sebuah orientasi ke atas menjadi sebuah individualisme ataupun perubahan dari masyarakat *feodal* kepada masyarakat *borjuis*.

Adapun manfaat budaya politik terbagi menjadi tiga, yaitu:

- a. Sikap-sikap warga Negara terhadap sistem politik akan mempengaruhi tuntutan-tuntutan, tanggapan, dukungan, serta orientasinya terhadap sistem politik.

¹³ Ismid Hadad, *Budaya Politik Dan Keadilan Sosial* (Jakarta: LP3ES, 1979), hlm. 232.

- b. Dengan memahami hubungan antara budaya politik dengan sistem politik dengan memahami hubungan antara budaya politik dengan sistem politik, maksud-maksud individu melakukan kegiatan dalam sistem politik atau
- c. Memahami hubungan antara budaya politik dengan sistem politik, maksud-maksud individu melakukan kegiatan dalam sistem politik atau faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya pergeseran politik dapat di mengerti. Budaya politik pada setiap masyarakat yang terdiri dari sejumlah individu yang hidup dalam sistem politik tradisional, transnasional, maupun modern. Almond dan Verba melihat bahwa pandangan tentang obyek politik, terdapat tiga komponen yakni komponen kognitif, efektif, dan evaluatif.

2. Bentuk-bentuk budaya politik etnis Jawa

Yahya Muhaimin mengutarakan tentang beberapa sikap-sikap masyarakat Jawa dalam pelaksanaan politik di Indonesia. Adapun sikap-sikapnya yaitu:

- Konsep Halus

Konsep halus ini bagi masyarakat Jawa sudah ditanamkan sejak kecil. Masyarakat Jawa lebih menghindarkan diri untuk tidak terjadi suatu konflik dengan pihak lain dengan dasar masyarakat mudah merasa tersinggung dan mempunyai hati yang lembut dan tutur kata yang halus.

- Menjunjung Tinggi Ketenangan Sikap

Sikap ini merupakan tingkah laku yang halus dan sopan. Sikap ini mencerminkan kehalusan jiwa yang diwujudkan dengan pengendalian diri dan pengekangan diri. Masyarakat Jawa menganggap orang yang berwibawa tidak perlu berarti orang yang aktif ataupun orang-orang yang harus memecahkan berbagai masalah atau orang-orang yang terlibat dalam pembuatan keputusan sehari-hari.

- Konsep kebersamaan

Dalam budaya Jawa kebersamaan tidak hanya sekedar diaktualisasikan dalam aspek-aspek materialistis melainkan juga dalam aspek yang non-materialistis. Apabila seseorang mempunyai suatu hak atas sesuatu maka masyarakat Jawa beranggapan bahwa mereka bisa menikmati hak tersebut dan pihak tersebut mempunyai hak juga untuk membiarkan orang lain untuk menikmatinya. Maka karena itu apabila seseorang memiliki kewajiban ataupun tanggung jawab maka orang tersebut cenderung ingin membagi kewajiban dan tanggung jawab itu kepada orang lain. Dengan demikian, suatu pihak dituntut untuk mempertanggung jawabkan kewajibannya, maka secara tidak sadar ia bersikap agar orang lain juga bersama-sama memikul tanggung jawab itu. Ini menyebabkan hilangnya hak dan kewajiban serta tanggung jawab seseorang.

Dapat disimpulkan bahwa dalam hubungan sosial politik masyarakat Jawa bersifat sangat personal. Terdapat suatu

kecenderungan bahwa masyarakat Jawa mempunyai sifat ketergantungan terhadap atasan serta ketaatan yang berlebihan pada kekuasaan karena status yang dipandang sebagai kewibawaan politik dijunjung begitu tinggi.

3. Kepribadian masyarakat Jawa

Kepribadian merupakan sesuatu yang menggambarkan ciri khas seseorang yang membedakan orang tersebut dengan orang lain. Kepribadian juga disebut sebagai tingkah laku atau tindak perbuatan dari tiap individu yang berbeda dengan individu lainnya yang disebabkan atas pengaruh susunan akal dan jiwa seseorang.¹⁴

Terbentuknya sebuah kepribadian dalam masyarakat tentu mempunyai alasan ataupun unsur-unsur yang membentuk kepribadian tersebut. Unsur utamanya yaitu kepribadian dasar. Kepribadian dasar merupakan semua unsur kepribadian yang dimiliki bersama oleh suatu bagian besar dari warga suatu masyarakat. Terbentuknya kepribadian dasar dikarenakan semua masyarakat mengalami pengaruh lingkungan kebudayaan yang sama selama masa pertumbuhannya. Seperti halnya kepribadian masyarakat Jawa, munculnya kepribadian masyarakat Jawa dikarenakan adanya individu-individu dalam masyarakat Jawa yang tingkah laku dan perbuatannya saling mempengaruhi sehingga ada kecenderungan sikap dan pola kelakuan yang meniru. Maka

¹⁴ Koentjaningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: Aksara Baru, 1979), hlm. 116.

terciptalah perbedaan antara kepribadian masyarakat Jawa dengan dengan kepribadian masyarakat lain.

Secara khusus kepribadian masyarakat Jawa adalah ciri-ciri watak masyarakat Jawa yang lebih konsisten, sehingga memberikan masyarakat Jawa suatu identitas dengan masyarakat yang khusus. Kepribadian masyarakat Jawa sendiri terbagi menjadi dua kategori yaitu “Kepribadian Timur” yaitu masyarakat Jawa yang mementingkan kehidupan kerohanian, dan “Kepribadian Barat” yaitu masyarakat Jawa yang lebih mementingkan kehidupan kejasmanian.¹⁵

C. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)

1. Sistem Pemilihan Daerah

Kepala daerah dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2005 ayat (1) yang berbunyi:¹⁶

“Setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintah daerah yang disebut kepala daerah. Kepala daerah sebagaimana yang disebut pada ayat (1) Untuk Provinsi disebut Gubernur, untuk Kabupaten disebut Bupati dan untuk Kota disebut Wali Kota”.

Dalam Undang-Undang nomor 8 tahun 2005 ini menjelaskan mengenai pembagian setiap kepala daerah baik itu tiap-tiap Provinsi, Kabupaten maupun Kota. Sehingga Undang-Undang ini dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam pembagian kepala daerah disetiap Provinsi, Kabupaten ataupun Kota.

¹⁵ Dwi siswanto, *Orientasi Pemikiran Filsafat Sosial* (Yogyakarta: Penerbit Lima, 2009), hlm. 205.

¹⁶ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Pemerintahan Daerah

2. Sejarah Sistem Pemilihan Kepala Daerah

Pemilihan kepala daerah di Indonesia beberapa kali mengalami perubahan. Pada tanggal 23 November 1945 pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1945 yang mana merupakan Undang-Undang pertama yang membahas mengenai pemerintahan daerah yang terdapat dalam Pasal 18 UUD 1945. Sistem pemilihan kepala daerah yang diatur dalam pasal tersebut ialah dilakukan dengan cara pemerintah pusat menunjuk langsung kepala daerah.

Seiring perkembangan jaman, tanggal 10 juli 1948 pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1948 tentang pemerintahan di Daerah karena Undang-Undang Nomor 1 tahun 1945 dianggap sudah tidak sesuai dengan semangat kebebasan setelah kemerdekaan. Namun perubahan ini tidak merubah semuanya, karena didalam nya masih mengatur sistem pemilihan kepala daerah yang sama dengan sebelumnya yaitu dengan cara pemerintah pusat menunjuk kepala daerah dengan rincian calon Gubernur diajukan oleh DPRD lalu diangkat oleh Presiden, sedangkan calon Bupati/Walikota diajukan oleh DPRD kemudian diangkat oleh Mendagri.

Setelah mengalami revisi terhadap beberapa sistem pemilihan kepala daerah, mulai dari masa kemerdekaan, masa orde baru, hingga masa reformasi. Yang mana pada masa reformasi dalam pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 mengatur mengenai sistem pemilihan kepala daerah yang menyatakan bahwa pemilihan atau

pengisian kepala daerah dan wakil kepala daerah Gubernur, Bupati dan Walikota dilakukan oleh DPRD melalui pemilihan secara bersamaan. Namun ini menjadi permasalahan karena menutup akses orang-orang yang ingin menjadi pemimpin.

Maka karena itu pada tahun 2004 dilakukan revisi kembali terhadap Undang-Undang sebelumnya dan disahkannya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 mengatur tentang sistem pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung oleh rakyat dan pemerintahan daerah yang memberi kewenangan lebih luas kepada daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri dalam menyelenggarakan pemerintahan.

Berlangsungnya pemilihan kepala daerah secara langsung memberikan kontribusi yang positif dalam keberlangsungan pemerintahan lokal yang otonom dan demokratis, tapi secara empiris kemungkinan terdapat potensi masalah dari berbagai macam aspek. Walaupun demikian pemilihan kepala daerah yang telah ditetapkan telah memberikan kesempatan terhadap masyarakat secara umum untuk berpartisipasi menyuarakan hak-hak mereka.

Beberapa sistem pemilihan kepala daerah pernah diterapkan di Indonesia. Ini bisa menjadi pengalaman dalam memberikan pelajaran

terhadap Negara Indonesia dalam menentukan sistem pemilihan kepala daerah yang tepat dan berdasarkan prinsip demokrasi.¹⁷

3. Asas-asas pemilihan kepala daerah

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung telah diatur dalam Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah pasal 56 Nomor 119 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 06 Tahun 2005 tentang cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala daerah dan Wakil Kepala daerah. Secara terperinci ketentuan tentang Pilkada secara langsung terdapat dalam cara pemilihan dan asas-asas yang digunakan dalam penyelenggaraan pilkada yang terdapat dalam pasal 56 ayat 1 yang berbunyi:

“Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil”¹⁸

Asas lebih sekedar visi dan misi, atau kaidah dan motto. Asas juga menentukan seberapa kualitas pemilihan umum itu dilaksanakan, serta sejauh mana integritas penyelenggara pemilihan umum dipertaruhkan. Asas memang bukan jaminan mutlak dalam pelaksanaan pemilihan umum, namun itu merupakan indikator apakah pelaksanaan pemilihan umum berjalan demokratis.

Asas pemilihan umum sebenarnya bukanlah sesuatu yang lahir secara tiba-tiba. Keberadaannya merujuk pada sebuah kesepakatan

¹⁷ M. Lutfi Chakim, “Perubahan Sistem Pemilihan Kepala Daerah Dalam Dinamika Pelaksanaan Demokrasi”, Jurnal rechts vinding, Vol. 3 No. 1., Tahun 2014, hlm. 9.

¹⁸ Undang-undang Nomor 32 tahun 2004, Pasal 56 Ayat 1 tentang Pemerintahan Daerah

besar mengenai penegakan Hak Asasi Manusia (HAM). Hak untuk memilih, dipilih serta berkumpul menyuarakan pendapatnya merupakan bagian integral dari Hak Konstitusionalitas yang melekat dalam kehidupan bernegara.¹⁹

Sebagai tolak ukur atau parameter suatu Pemilihan kepala daerah demokrasi atau tidak adalah asas-asas Pemilu. Asas adalah suatu pangkal tolak pikiran untuk sesuatu kasus atau suatu jalan dan sarana untuk menciptakan sesuatu tata hubungan atau kondisi yang dikehendaki. Asas-asas tersebut ditaati dan diterapkan secara konsisten oleh para *stake holder* Pemilihan kepala daerah, maka Pemilihan kepala daerah tersebut dapat dikatakan Pemilihan kepala daerah yang demokrasi.

Asas-asas yang dimaksud adalah asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

1) Asas langsung

Rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak dan hatinuraninya tanpa perantara. Dalam asas ini tentunya tidak ada keterwakilan dalam pemilihan umum sehingga tidak ada satu warga negara pun yang dapat memwakilkan suaranya kepada orang lain.

¹⁹ Sun Fatayi, "Relevansi Asas-Asas Pemilu sebagai Upaya Menciptakan Pemilu yang Demokratis dan Berintegritas" *Jurnal Pemikiran Keislaman*, Vol. 28 No. 1, Januari-Juni 2017.

2) Asas Umum

Pada dasarnya semua warga negara memenuhi persyaratan sesuai dengan Undang-Undang berhak mengikuti pemilu. Pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial.

3) Asas Bebas

Setiap warga negara yang berhak memilih, bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun. Di dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak dan hati nuraninya. Terjaminnya suara setiap warga negara tentunya telah terjamin keamanannya tanpa adanya paksaan yang menimbulkan tekanan dalam menentukan pilihannya dalam pemilihan umum.

4) Asas Rahasia

Pada saat Pemilu, pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak manapun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa suaranya diberikan. Sehingga keabsahan suara dapat terjamin pada tiap pemilih yang ikut memberikan suaranya.

5) Asas Jujur

Saat penyelenggaraan pemilu berlangsung, setiap penyelenggara pemilu, aparat pemerintah, pasangan calon, partai politik, tim kampanye, pengawas pemilu, pemantau pemilu, pemilih, peserta semua pihak terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tidak hanya pemilih setiap orang baik penyelenggara maupun peserta juga ikut andil dalam menjalankan asas jujur ini dan tentunya kejujuran yang harus ditanamkan dalam pemilihan umum yang diselenggarakan. Pemilihan yang jujur maka akan menghasilkan pemimpin yang jujur pula.

6) Asas Adil

Setiap penyelenggaraan pemilu dan semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak adil. Pemilih dan pasangan calon harus mendapat perlakuan yang adil serta bebas dari kecurangan pihak manapun.²⁰ Tidak adanya perbedaan antara pasangan calon yang satu dengan pasangan calon yang lainnya dimana setiap peserta pemilihan umum memiliki hak yang sama.

Pemilihan umum menjadikan keenam asas-asas di atas sebagai batu pacuan dalam menjalankan proses pemilihan umum agar berjalan sesuai dengan apa yang telah menjadi tujuan bangsa Indonesia dalam pemilihan umum yang adil serta aman.

²⁰ Ade Kosasih, "Menakar Pemilihan Umum Kepala Daerah Secara Demokratis" *Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol. 2 No. 1, 2017, hlm. 41.

D. Demokrasi

1. Pengertian demokrasi

Demokrasi dapat dilihat secara bahasa (*epistemologis*) dan istilah (*terminologis*). Secara *epistemologis*, demokrasi terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani yaitu “*demos*” yang artinya rakyat atau penduduk suatu tempat, dan “*cretein*” ataupun “*cratos*” yang bermakna kekuasaan atau kedaulatan. Jadi secara bahasa *demos cratos* dan *demos cretein* ialah suatu keadaan Negara yang mana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada ditangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Demokrasi mempunyai tiga teori yang dikemukakan oleh Carol C. Gould. Tiga teori demokrasi menurut Gould yaitu:

- a. Teori demokrasi model individualisme liberal, teori ini menjelaskan bahwa demokrasi sebagai pelindung seseorang dari kesewenang-wenangan kekuasaan pemerintah dan mendudukan pemerintah sebagai pelindung kebebasan seluruh rakyat dari ancaman maupun gangguan. Demokrasi ini menginginkan kesamaan universal bagi seluruh rakyat dan kesamaan hak bagi seluruh rakyat didalam proses perpolitikan yang sering dinamakan “satu orang satu suara” (*one man one vote*).²¹
- b. Teori demokrasi dari kaum pluralis, teori pluralis memusatkan perhatian pada kepentingan kelompok sebagai agresi dari

²¹ Carol C. Gould, *Demokrasi Ditinjau Kembali* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994), hlm. 36.

kepentingan individual, dan kemunculannya akan mengakibatkan konflik dalam proses politik. Sehingga demokrasi politik ditafsirkan sebagai sistem pemerintahan yang menengahi konflik kompetisi untuk memperoleh keseimbangan sosial. Teori ini menyatakan bahwa pluralisme melindungi kebebasan memilih para individual dengan menyediakan alternative politik yang mampu mewakili pluralitas kelompok kepentingan ataupun partai.²²

- c. Teori demokrasi *sosialisme holistic* merupakan pendekatan yang menekankan demokrasi ekonomi dan muncul untuk menanggapi ditolaknya hubungan sosial dan ekonomi yang dilontarkan oleh individualisme liberal. Yang menarik dari teori ini ialah bahwa kebebasan tampak sebagai kebebasan dari kesuluruhan untuk mengaktualisasikan potensinya melalui kegiatan-kegiatan individu.

Sedangkan Moh. Mahfud MD menyatakan ada dua alasan dipilihnya demokrasi sebagai sistem masyarakat dan bernegara. Yang pertama, hampir semua Negara di dunia ini telah menjadikan demokrasi sebagai asas yang fundamental. Yang kedua, demokrasi sebagai asas kenegaraan yang telah memberikan arah bagi peranan masyarakat untuk menyelenggarakan Negara sebagai organisasi tertinggi. Maka karena itu diperlukan pengetahuan dan pemahaman yang benar bagi masyarakat tentang demokrasi.²³

²² Hendra Nurtjahjo, *Filsafat Demokrasi* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006), hlm. 61.

²³ Moh. Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm. 86.

Hakikat demokrasi sebagai suatu sistem bermasyarakat dan bernegara serta merupakan pemerintahan yang memberikan penekanan terhadap keberadaan kekuasaan oleh rakyat. Dalam penyelenggaraan kekuasaan oleh rakyat mengandung pengertian tiga hal, yaitu:²⁴

a. Pemerintahan dari rakyat (*government of the people*)

Yang maknanya berhubungan dengan pemerintah yang sah dan diakui dimata rakyat (*ligimate government*). Sebaliknya ada juga pemerintah yang tidak diakui oleh rakyat (*unligimate government*). Pemerintah yang diakui adalah pemerintah yang mendapatkan pengakuan dari rakyat. Pentingnya ligitimasi bagi sebuah pemerintahan adalah pemerintah yang dapat menjalankan roda birokrasi dan programnya.

b. Pemerintah oleh rakyat (*government by the people*)

Maksud dari pemerintah oleh rakyat yaitu bahwa sebuah pemerintahan menjalankan kekuasaan atas nama rakyat bukan atas dorongan sendiri. Tanpa rakyat sebuah pemerintahan tidak akan ada. Pengawasan yang dilakukan oleh rakyat dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung melalui DPR.

c. Pemerintahan untuk rakyat (*government for the people*)

Pengertian nya ialah bahwa kekuasaan yang diberikan langsung oleh rakyat kepada pemerintah dijalankan untuk kepentingan rakyat. Pemerintah diharuskan menjamin adanya kebebasan terhadap

²⁴ Josep A. Scumpeter, *Capitalis, socialism & Democracy* (Raja grafindo Persada : Jakarta, 2011), hlm. 361.

masyarakat yang seluas-luasnya dalam menyampaikan aspirasi baik melalui media ataupun langsung.

Sedangkan pengertian demokrasi secara istilah telah dikemukakan oleh beberapa ahli, seperti:

1. Sidney hook, Demokrasi merupakan bentuk pemerintahan dimana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak langsung yang didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa.²⁵
2. Henry B. Mayo, menyatakan demokrasi sebagai sistem politik merupakan suatu sistem yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.²⁶

Maka makna demokrasi sebagai dasar hidup bermasyarakat dan bernegara mengandung pengertian bahwa rakyatlah yang memberikan ketentuan dalam sebuah masalah mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijakan Negara, karena kebijakan tersebut akan menentukan kehidupan rakyat, dengan demikian Negara yang menganut sistem

²⁵ Dede Rosyada, Dkk, *Demokrasi, Hak Asasi dan Masyarakat Madani* (Jakarta: Prenada Media, 2000), hlm. 112.

²⁶ Dede Rosyada, Dkk, *Demokrasi, Hak Asasi...*, hlm. 112.

demokrasi adalah Negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat.²⁷

Adapun macam-macam demokrasi terbagi menjadi 5 bagian, yaitu:²⁸

- a. Demokrasi liberal, ialah pemerintahan yang dibatasi oleh undang-undang dan pemilihan umum bebas yang diselenggarakan dalam waktu yang singkat.
- b. Demokrasi terpimpin, ialah para pemimpin yang percaya bahwa semua tindakan mereka dipercayai oleh rakyat tetapi mereka menolak pemilihan umum yang bersaing sebagai acuan untuk menduduki kekuasaan.
- c. Demokrasi sosial, ialah demokrasi yang menaruh kepedulian pada keadilan sosial bagi persyaratan untuk memperoleh kepercayaan politik.
- d. Demokrasi partisipasi, ialah yang menekankan hubungan timbal balik antara penguasa dan yang dikuasai.
- e. Demokrasi *consociational*, ialah yang menekankan proteksi khusus bagi kelompok-kelompok budaya yang menekankan kerjasama yang erat diantara elit yang mewakili bagian budaya masyarakat utama.

E. Kepemimpinan Menurut Pandangan Islam

Kepemimpinan merupakan sebuah ketetapan yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan karena pemimpin dan memimpin merupakan

²⁷Winarno, *Paradigm Baru Pendidikan Kewarganegaraan: Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), hlm. 114.

²⁸Dede Rosyada, Dkk, *Demokrasi, Hak Asasi...*, hlm. 114.

bagian dari kehidupan. Setiap manusia adalah pemimpin bagi dirinya sendiri. Karena kehadiran manusia di muka bumi sudah mengemban amanat yang diberikan oleh Allah Swt. sebagai khalifah dan pemimpin untuk melayani, mengabdikan, menjaga dan mengatur bumi dengan sebaik-baiknya agar tercipta kehidupan yang damai, aman dan tentram.²⁹

Pandangan Islam sendiri mengenai keberadaan pemimpin merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah Negara dan masyarakat. Hal ini dapat dilihat pada zaman kekhalifahan Rasulullah SAW sebagai pemimpin umat Islam.³⁰ Seiring dengan perkembangan zaman dan perkembangan Ilmu Pengetahuan, sejarah peradaban manusia menunjukkan bahwa salah satu faktor keberhasilan serta keberlangsungan suatu Negara ataupun Organisasi adalah faktor kepemimpinan. Berkembangnya sebuah organisasi sangat dipengaruhi oleh seorang pemimpin. Pemimpin yang ideal merupakan pemimpin harapan bagi sebuah Negara maupun disetiap lembaga.³¹

Islam merupakan Agama *rahmatan lil 'alamin* yang tujuannya membawa berkah kepada seluruh alam. Hal-hal kecil sekalipun telah diatur sedemikian rupa baik itu menyangkut masalah duniawi maupun akhirat. Sangat sulit menemukan seorang pemimpin yang sesuai dengan kriteria menurut ajaran agama Islam. Kepemimpinan ini sendiri bertujuan

²⁹Ainun najib, "Kontruksi Pemimpin Ideal Untuk Indonesia", *Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 3 No. 1 Tahun 2013, hlm. 1.

³⁰Mujar Ibnu Syarif, *Fiqh Siyasah doktrin dan pemikiran politik Islam* (Jakarta: PT. Gelora Aksara, 2008), hlm. 96.

³¹Sahadi, Otong Husni Tufiq, "Karakter Kepemimpinan Ideal Dalam Organisasi", *Jurnal Moderat*, Vol. 6. No. 3 Tahun 2020, hlm. 5.

untuk mengubah suatu keadaan yang buruk menjadi baik, yang baik menjadi lebih baik kedepannya. Pemimpin itu sendiri mempunyai kekuasaan untuk mengajak seluruh masyarakat untuk melakukan sesuatu demi mencapai suatu tujuan yang baik.³²

1. Kriteria pemimpin menurut Islam

Pemimpin merupakan seseorang yang mempunyai pemikiran yang kuat dan cerdas, pemimpin yang memberikan hati, ataupun pemimpin yang memberikan harapan yang kuat terutama untuk dirinya sendiri. Menjadi seorang pemimpin tentunya mempunyai kriteria guna mendapatkan pemimpin yang ideal. Para pemikir ataupun tokoh-tokoh Islam mempunyai kriteria dalam memilih seorang pemimpin, yaitu:³³

a. Imam Al-Mawardi

- 1) Sikap adil
- 2) Ilmu yang memadai untuk Ijtihad
- 3) Sehat indera (pendengaran, penglihatan, dan lisan)
- 4) Utuh anggota tubuh
- 5) Wawasan yang memadai untuk mengatur kehidupan rakyat dan mengelola kepentingan umum
- 6) Keberanian untuk melindungi rakyat dan membantai musuh
- 7) Keturunan Qurais

³²Arsyad Sobby Kesuma, "Pandangan Ulama Tentang Kepemimpinan Dalam Islam", *Jurnal Islamica*, Vol. 4 No. 1 Tahun 2019, hlm. 125.

³³Ahmad khoirul fata, "Kepemimpinan Dalam Perspektif Pemikiran Politik Islam", *Jurnal Review Politik*, Vol. 2 No. 1 Tahun 2012, hlm. 11.

b. Imam Al-Ghazali

- 1) Dewasa (aqil baligh)
- 2) Otak yang sehat
- 3) Merdeka/bukan budak
- 4) Laki-laki
- 5) Keturunan Quraisy
- 6) Pendengaran dan penglihatan yang sehat
- 7) Kekuasaan yang nyata
- 8) Hidayah, daya pikir dan daya rancang yang kuat dan ditunjang oleh kesediaan bermusyawarah, mendengar pendapat serta nasehat orang lain
- 9) Ilmu pengetahuan
- 10) Wara' (kehidupan yang bersih dengan kemampuan mengendalikan diri, tidak berbuat hal-hal terlarang dan tercela).

Dari beberapa teori yang dipaparkan oleh beberapa tokoh muslim tersebut syarat memilih pemimpin dalam Islam salah satunya haruslah beragama Islam sebagaimana tertuang dalam Al-Quran tentang memilih pemimpin yaitu dalam QS. Ali Imran : 28.

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرْكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ (٢٨)

Artinya: Janganlah orang-orang mu'min mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mu'min. Barangsiapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah kecuali

karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa) Nya. Dan hanya kepada Allah kembali (mu).³⁴

QS. An-Nisaa' : 144

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَتُرِيدُونَ أَنْ تَجْعَلُوا لِلَّهِ
عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُّبِينًا (١٤٤)

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mu'min. Inginkah kamu mengadakan alasan yang nyata bagi Allah (untuk menyiksamu)?³⁵

Dari ayat di atas dapat kita simpulkan bahwa Allah Swt melarang kita umat Islam untuk mengangkat pemimpin yang beragama non muslim. Apabila kita umat muslim memilih seorang pemimpin yang beragama non muslim berarti kita menentang ajaran Allah Swt. memilih pemimpin kafir sebagai pemimpin umat Islam berarti kita memberikan peluang kepada orang kafir untuk merusak umat Islam dengan kekuasaan dan kewenangan yang ia miliki. Dengan hadirnya pemimpin non muslim ditengah masyarakat muslim maka peraturan serta kebijakan yang akan ditetapkan belum tentu akan berpihak terhadap kepentingan umat muslim.

³⁴ Al-Quran Surah Ali Imran Ayat 28 Tentang Memilih Pemimpin.

³⁵ Al-Quran Surah An-Nisaa Ayat 144 Tentang Syarat Memilih Pemimpin

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian ini diperlukan suatu metode yang bertujuan untuk memperoleh data yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini secara jelas. Adapun metode-metode penelitian tersebut ialah:

A. Lokasi dan waktu penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Padang Sidempuan tepatnya di dalam Organisasi Pujakesuma DPD Padang Sidempuan. Alasan peneliti melakukan penelitian di lokasi ini di karenakan peneliti merasa tertarik akan membahas mengenai apa sebenarnya alasan Organisasi Pujakesuma lebih dominan memilih pasangan yang beretnis Jawa, serta menjawab semua rumusan masalah yang ingin peneliti teliti seperti bagaimana peran Pujakesuma sendiri dalam pemilihan Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018 dan faktor-faktor apa saja yang menjadi pertimbangan Pujakesuma dalam menentukan dukungan pada Pemilihan Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018. Oleh karena itu peneliti merasa tertarik dengan Organisasi Masyarakat Pujakesuma di Padang Sidempuan.

Adapun waktu yang digunakan dalam penelitian ini dilaksanakan mulai bulan Juni tahun 2022 sampai dengan selesai.

B. Subjek penelitian

Subjek Penelitian merupakan orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi, kondisi latar belakang penelitian. Adapun subjek dalam penelitian ini yaitu orang-orang yang berada di dalam

Organisasi Pujakesuma yang merupakan orang yang benar-benar mampu mengetahui permasalahan yang akan diteliti dan mampu memberikan informasi secara benar.³⁶ Adapun subjek penelitian ini yaitu yang terdapat didalam rumusan masalah yaitu bagaimana peran Pujakesuma di Padang Sidempuan dalam pemilihan Gubernur Sumatera utara tahun 2018 dan Faktor-faktor apa saja yang menjadi pertimbangan Pujakesuma dalam menentukan dukungan pada Pemilihan Gubernur Sumatera Utara tahun 2018.

C. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian lapangan (*Field Research*) yang mana penelitian ini dilakukan secara langsung ke Organisasi Pujakesuma sebagai objek penelitian ini.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari lapangan. Berdasarkan tujuan penelitian ini maka peneliti memilih metode kualitatif yang ingin melihat bagaimana peran Organisasi Pujakesuma di Padang Sidempuan berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah Gubernur Sumatera Utara.

D. Jenis Data Penelitian

Pada penelitian ini terdapat dua jenis data yaitu data utama (primer) dan data pendukung (sekunder).

1. Data primer merupakan data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sendiri yang diperoleh secara langsung dari sumbernya yaitu Ketua Organisasi Pujakesuma di Padang Sidempuan.

³⁶ Lexy J, Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1984), hlm. 14.

2. Sedangkan data sekunder ialah data yang sudah tersusun dan sudah dijadikan dalam bentuk dokumen-dokumen. Data sekunder merupakan data yang sudah diolah terlebih dahulu, sumber-sumber data sekunder yaitu buku, publikasi, jurnal dan situs-situs lain yang mendukung penelitian tersebut.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara ini dilakukan secara terstruktur dengan cara membuat daftar pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu oleh peneliti dan pertanyaan tersebut diujikan kemampuannya agar peneliti memperoleh data yang dibutuhkan. Kemudian pertanyaan-pertanyaan ini ditanyakan secara langsung kepada informan yang berada di Organisasi Pujakesuma, yaitu Bapak Purnadi S.E selaku ketua umum Pujakesuma untuk menggali informasi atau persepsi subjektif dari informan terkait topik yang ingin diteliti.

Teknik wawancara yang digunakan ialah wawancara mendalam, yaitu dengan cara mengumpulkan data ataupun informasi dengan cara langsung bertatap muka dengan informan, dengan maksud mendapatkan gambaran lengkap tentang topik yang diteliti.

2. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data langsung dari tempat penelitian. Dokumentasi biasanya berbentuk tulisan, gambar, ataupun karya-karya monumental dari seseorang. Adapun dokumen yang

berbentuk tulisan seperti catatan harian, sejarah kehidupan, cerita biografi, peraturan kebijakan, struktur organisasi. Sedangkan yang berbentuk gambar seperti foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain.

F. Teknik Pengolahan Data

Metode pengolahan data harus sesuai dengan keabsahan data. Cara kualitatifnya artinya menguraikan data dalam bentuk kalimat teratur, logis, runtun dan efektif sehingga memudahkan pemahaman interpretasi data. Adapun tahapan-tahapan dalam menganalisis data yaitu sebagai berikut:

1. *Editing*/ edit

Editing adalah kegiatan yang dilakukan setelah penghimpunan data di lapangan. Proses ini menjadi penting karena kenyatannya bahwa ada yang terhimpun kadangkala belum memenuhi harapan peneliti, ada diantaranya kurang bahkan terlewatkan. Oleh karena itu dalam proses menganalisis data sangat perlu tahap *editing*.

2. Klasifikasi

Agar penelitian lebih sistematis, maka data hasil wawancara diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu. Yaitu berdasarkan pertanyaan dalam rumusan masalah, sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informasi di dalam penelitian ini.

3. Verifikasi

Verifikasi adalah mengecek kembali data-data yang sudah terkumpul untuk mengetahui keabsahan datanya apakah benar-benar sudah valid dan sesuai dengan yang diharapkan peneliti.³⁷

G. Analisis Data

Analisis data merupakan metode atau cara mendapatkan data menjadi informasi sehingga karakteristik sebuah data tersebut menjadi mudah untuk dipahami dan juga bermanfaat untuk menemukan solusi permasalahan, yang utama adalah masalah tentang sebuah penelitian. Setelah ditelaah dan dipelajari secara mendalam maka langkah selanjutnya adalah menyusun dan mengelompokkan sesuai dengan pembahasan.³⁸

H. Teknik Uji Keabsahan Data

Pada penelitian ini digunakan untuk memperoleh data yang mampu dipertanggungjawabkan secara ilmiah, untuk itu dari data yang ada terlebih dahulu dilakukan adalah keabsahan data. Keabsahan data diwujudkan dalam rangka untuk memberikan bukti mengenai kebenaran dari hasil temuan penelitian dengan kenyataan yang ada di lapangan. Pengabsahan dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data triangulasi.³⁹

³⁷ Sukur Kolil, *Metodologi Penelitian* (Bandung: Pustaka Media, 2006), hal. 134.

³⁸ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Bandung: CV Alfabeta, 2012), hal. 243-245.

³⁹ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 90.

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber artinya membandingkan dengan cara mengecek kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang telah diperoleh melalui sumber yang berbeda. Misalnya membandingkan hasil dari pengamatan dengan wawancara, membandingkan antara apa yang dikatakan secara umum dengan yang dikatakan secara pribadi, membandingkan hasil wawancara dengan dokumen.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kualitas data dengan cara mengecek kembali data melalui referensi yang sama dengan metode yang berbeda. Contohnya data yang didapatkan dari hasil wawancara, kemudian dilakukan pengecekan dengan observasi, dokumentasi, atau kuesioner. Apabila dengan menggunakan teknik pengujian kredibilitas data tersebut, mampu memberikan data berbeda, maka peneliti perlu mengadakan diskusi ketahap selanjutnya ke sumber data yang berkaitan atau yang lain, untuk dapat memastikan data mana yang dianggap paling benar atau mungkin semuanya benar, sebab sudut pandangnya berbeda.

3. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu juga selalu mempengaruhi keaslian informasi yang didapatkan, data yang terkumpul dengan cara wawancara dari pagi hari saat narasumber masih dalam keadaan segar, belum banyak permasalahan akan memberikan informasi yang lebih akurat sehingga lebih kredibel. Untuk itu, dalam hal pengujian kredibilitas data digunakan

berbagai metode seperti dengan cara melakukan pengecekan dengan mewawancarai, observasi, atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil dari percobaan menimbulkan informasi yang berbeda, maka dapat dilakukan secara berulang-ulang sehingga bisa ditemukan data pastinya. Triangulasi juga bisa dilakukan dengan cara mengecek hasil dari penelitian, hasil penelitian lain yang diberikan tugas dilakukan pengumpulan data.⁴⁰

⁴⁰ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 90.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Tempat Penelitian

1. Sejarah Kota Padang Sidempuan

Sekitar tahun 1700, Padang Sidempuan merupakan lokasi dusun kecil yang sering disinggahi oleh para pedagang sebagai tempat peristirahatan yang disebut “*Padang Na Dimpu*”. “*Padang Na Dimpu*” berarti suatu daratan di ketinggian yang ditumbuhi ilalang yang terletak di Kampung Bukit Kelurahan Wek II, dipinggiran Sungai Sangkumpal Bonang. Pada tahun 1825 oleh Tuanku Lelo, salah seorang pengirim pasukan kaum Padri, dibangun benteng Padang Sidempuan yang lokasinya ditentukan oleh Tuanku Tambusai, yang dipilih karena cukup strategis ditinjau dari sisi pertahanan karena dikelilingi oleh sungai yang berjurang.

Sejalan dengan perkembangan benteng Padang Sidempuan, maka aktivitas perdagangan berkembang di Sitamiang (sekarang), termasuk perdagangan budak yang disebut hatoban. Untuk setiap transaksi perdagangan, Tuanku Lelo mengutip bea 10 persen dari nilai harga barang. Melalui Traktat Hamdan tanggal 17 Maret 1824, kekuasaan Inggris di Sumatera diserahkan kepada Belanda, termasuk *Residency Tappanooli* yang dibentuk Inggris tahun 1771. Setelah menumpas gerakan kaum Padri tahun 1830, Belanda membentuk *District* (setingkat kewedanaan) Mandailing, *District* Angkola dan

District Teluk Tapanuli dibawah kekuasaan *Government Sumatras West Kust* berkedudukan di Padang. Antara tahun 1885 sampai dengan 1906, Padang Sidempuan pernah menjadi Ibukota Residen Tapanuli.

Pada masa awal kemerdekaan, Kota Padang Sidempuan adalah merupakan pusat pemerintahan, dari lembah besar Tapanuli Selatan dan pernah menjadi Ibukota Kabupaten Angkola Sipirok sampai digabung kembali Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Angkola Sipirok dan Kabupaten Padang Lawas melalui Undang-Undang Darurat Nomor 70/DRT/1956.⁴¹

Kemudian pada tanggal 9 Nopember 2001 diresmikan Padang Sidempuan menjadi kota oleh Gubernur Sumatera Utara dan Drs. Zulkarnain Nasution dilantik sebagai pejabat Walikota Padang Sidempuan. Pada awal pembentukan, Kota Padang Sidempuan memiliki luas wilayah sebesar 11.465,66 Ha dengan jumlah kecamatan sebanyak 5 kecamatan yang terdiri dari 58 desa dan 20 kelurahan, Kelima kecamatan tersebut meliputi :

- a. Kecamatan Padang Sidempuan Tenggara
- b. Kecamatan Padang Sidempuan Selatan
- c. Kecamatan Padang Sidempuan Batunadua
- d. Kecamatan Padang Sidempuan Utara
- e. Kecamatan Padang Sidempuan Hutaimbaru

⁴¹ Undang-undang Darurat Nomor 70 Tahun 1956

Melalui Peraturan Daerah Kota Padang Sidempuan Nomor 45 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan Angkola Julu serta Peraturan Daerah Kota Padang Sidempuan Nomor 46 Tahun 2003 tentang Pemekaran Kelurahan dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan dalam Daerah Kota Padang Sidempuan maka Kota Padang Sidempuan dimekarkan menjadi 6 kecamatan yang terdiri dari 42 desa dan 37 kelurahan.

Dari sejarah terbentuknya Kota Padang Sidempuan tentunya Padang Sidempuan memiliki kewenangan untuk mengurus Wilayahnya sendiri. Dalam hal ini otomatis terbentuklah Polres Kota Padang Sidempuan yang beralamat di JL. HD. Baginda Oloan No. 7 Kec. Psp Utara Kota Padang Sidempuan.

Tentunya dengan keberadaan kantor ini diharapkan mampu memberikan rasa keamanan dan memelihara ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat di lingkungan Kota Padang Sidempuan. Adapun jumlah penduduk masyarakat kota Padang Sidempuan pada tahun 2018 yaitu 218 892,00 jiwa.⁴²

2. Sejarah Lahirnya Paguyuban Pujakesuma
 - a. Sejarah Paguyuban Pujakesuma

Paguyuban merupakan kata yang berasal dari kata guyub. Menurut (KBBI) Kamus besar bahasa Indonesia, Paguyuban merupakan sebuah

⁴² Bps Padangsidempuan Tahun 2018

perkumpulan yang sifatnya kekeluargaan yang didirikan oleh orang-orang yang berasal daerah yang sama dan juga memiliki ide yang sama dengan tujuan menciptakan persatuan yang rukun sesama anggota.

Sedangkan Pujakesuma merupakan sebuah wadah perkumpulan ataupun Organisasi masyarakat yang terletak di Sumatera Utara yang mana orang-orang di dalamnya harus beretnis Jawa. Pujakesuma ini didirikan sebagai tempat penyaluran masyarakat Jawa terhadap budaya-budaya Jawa yang masih melekat pada diri mereka sendiri. Maka diciptakanlah sebuah wadah khusus etnis Jawa agar mereka memiliki identitas khas yang berbeda dengan etnis yang lain.

Sebelum berkembangnya Paguyuban Pujakesuma seperti sekarang, Paguyuban Pujakesuma ini memiliki sejarah panjang hingga akhirnya menjadi sebuah Organisasi besar yang banyak dikenal oleh masyarakat.

Pada tahun 1978 merupakan awal mula terbentuknya Paguyuban keluarga besar (PKB) Pujakesuma. Peristiwa ini berawal pada saat pertemuan sederhana yang diadakan di salah satu rumah letkol (CPM) Danu Soewarso yang beralamat di pasar VII Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara. Pertemuan ini diadakan secara rutin yang dihadiri beberapa orang keturunan Jawa di Sumatera dan pertemuan ini biasanya melakukan serasehan dan renungan.

Pertemuan ini biasanya diadakan pada waktu yang khusus seperti malam Selasa kliwon yang biasanya orang Jawa menyebut malam ini sebagai malam anggoro kasih. Pada saat pertemuan di malam hari, mekarlah sebuah bunga wijaya kesuma yang tumbuh di halaman rumah Letkol Danu Soewarso secara kebetulan. Bunga tersebut memiliki keunikan yang mana bunga tersebut hanya mekar setelah lewat tengah malam hari. Melihat bunga tersebut mekar para keturunan Jawa yang berada di lokasi pada saat itu menggagas nama PUJAKESUMA sebagai nama Paguyuban yang bertujuan untuk meningkatkan martabat keturunan Jawa.

Awal mula berdirinya Pujakesuma diresmikan langsung pada tahun 1978 di halaman rumah Letkol Danu Soewarso. Namun di deklarasikan pada tanggal 10 juli 1980 yang diketuai oleh ketua umum pertama yaitu R. Soejono. Semakin berkembang PKB Pujakesuma mulai berdiri di beberapa kabupaten Sumatera Utara. Pada periode ini Pujakesuma semakin dikenal dikarenakan situasi perpolitikan. Pada masa itu Kolonel Mas Sukardi yang menjabat sebagai ketua Golkar dan menjabat sebagai ketua DPRD Sumatera Utara yang sekaligus merupakan tokoh Jawa sehingga Pujakesuma berpartisipasi dalam partai politik yang berkuasa pada saat itu.

Pujakesuma tentunya memiliki lambang ataupun logo yang menggambarkan ciri khas Pujakesuma. Danu Soewarso dengan Ki Jati Utomo adalah penggagas logo Pujakesuma.

Gambar. 1**Gambar Logo Pujakesuma****MAKNA LAMBANG PUJAKESUMA**

- A. Mahkota rama berkaki 5 (lima) dengan warna kuning emas berarti lambang keagungan dengan menjunjung tinggi PANCASILA.
- B. Lingkaran dengan warna merah putih di dalamnya berarti Lambang persatuan dan kesatuan serta dilandasi Jiwa Patriot (SAIYEG SAEKA PRAYA).
- C. Tulisan Pujakesuma berarti merupakan wadah dari putra kelahiran/kedudukan di Sumatera Utara.
- D. Kapas yang berjumlah 17 kelopak melambangkan cukup sandang dan mengingatkan kita kepada 17 Agustus hari kemerdekaan Negara Indonesia.
- E. Mata panah 8 (delapan) arah penjurang angin berarti berkembang kesegala arah penjurang dan angka 8 disebut bulan Agustus dalam urutan bulan dalam masehi, dimana bulan Agustus disebut bulan keramat bagi Republik Indonesia.

F. Padi yang berjumlah 45 (empat puluh lima) butir berwarna kuning berarti melambangkan cukup pangan dan dengan proklamasi 17 Agustus 1945 untuk menuju Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

G. Selendang/Sampur warna putih dengan jumbai kuning berarti penyebaran budaya bangsa bagi muda mudi dan masyarakat Sumatera Utara khususnya Bangsa Indonesia pada umumnya.

H. Dasar lambang putih berarti bekerja diatas kesucian dan kejujuran.

b. Sejarah lahirnya Etnis Jawa di Sumatera Utara

Awal mula kedatangan orang Jawa ke Sumatera Utara sejak awal abad ke-19.⁴³ Adapun tujuan mereka pindah ke Sumatera Utara dikarenakan pemaksaan oleh pemerintah kolonial Belanda yang menjadikan orang Jawa sebagai pekerja kontrak ataupun sebagai kuli di Sumatera Utara. Etnik Jawa yang masih menetap di Sumatera Utara disebut dengan Jawa Deli (Jadel) dan keturunannya hingga sekarang disebut dengan Pujakesuma (Putra Jawa Kelahiran Sumatera) yang menjadi wadah mereka untuk berkomunikasi sebagai sesama etnis Jawa.

Lahirnya Etnis Jawa di Sumatera Utara berawal dari empat gelombang yang terjadi, yaitu:

⁴³Kasim siyo, *WONG JAWA DISUMATERA, sejarah, Budaya, Filosofi & Interaksi Sosial Pujakesuma* (Jakarta: 2008), hlm. 74.

- a) Gelombang pertama, pada jaman Majapahit mereka memasuki daerah yang ingin mereka kuasai dan memindahkannya ke kerajaan Haru yang berada di wilayah pantai timur Sumatera Utara sehingga banyaknya orang Jawa menetap di Sumatera Utara.
- b) Gelombang kedua, pada jaman Hindia Belanda melakukan penjajahan. Etnis Jawa direkrut dengan paksa oleh para penjajah Belanda untuk dijadikan sebagai budak yang dipekerjakan di kebun-kebun Belanda yang ada di Sumatera Utara dengan jumlah orang yang cukup besar.
- c) Gelombang ketiga, jaman orde baru melalui program transmigrasi yaitu pemindahan penduduk dari suatu daerah yang padat ke daerah yang lain.
- d) Gelombang keempat, yaitu perpindahan masyarakat etnis Jawa ke Sumatera Utara melalui migrasi, perdagangan, bisnis, tugas pelajar, pekerjaan, dan lain-lain.

Jumlah etnis Jawa yang tinggal di wilayah Sumatera Utara semakin banyak. Semakin berkembang, orang-orang Jawa yang berada di Sumatera membentuk kelompok-kelompok yang mencirikan kekhasannya mereka dengan alasan rasa senasib sepenanggungan. Perkumpulan etnis yang muncul dilatarbelakangi dengan berbagai macam latar belakang yang tujuannya agar membuat orang Jawa seakan-akan dekat dengan tanah kelahiran mereka.

Munculnya perkumpulan-perkumpulan berdasarkan sesama etnis semakin berkembang, dan menyebabkan masyarakat yang berada disuatu tempat berupaya untuk menunjukkan identitas mereka masing-masing. Misalnya perkumpulan etnis ataupun marga menjadi simbol keberadaan mereka ditengah masyarakat lain. Contohnya etnis Batak, Minang dan Melayu. Adapun alasan mereka membentuk sesama etnis agar mereka diakui ditengah masyarakat lain, dan sebagai tempat perlindungan untuk mencari sebuah ketenangan serta menghilangkan rasa takut ditempat yang bukan daerah tanah kelahirannya.

Setelah lahirnya Pujakesuma di wilayah Sumatera, maka bermunculan pula berbagai perkumpulan-perkumpulan yang melatar belakangi etnis Jawa, yaitu:

a) Pajar (Paguyuban Jawa Rembug)

Paguyuban ini memiliki kesamaan seperti Pujakesuma, namun mengenai penyaluran aspirasi politiknya Paguyuban Jawa Rembug ini lebih diarahkan kepada Partai Bintang Reformasi.

b) PJB (Paguyuban Jawa Bersatu)

Paguyuban ini memiliki ketentuan dalam merekrut anggotanya. Adapun ketentuan utama nya yaitu harus beretnis Jawa dan beragama Islam.

c) FKPPWJ

Paguyuban ini didirikan sebagai wadah berkomunikasi guna menyatukan pendapat serta aspirasi warga Jawa. mereka juga

menciptakan paguyuban untuk kaum mudanya yaitu Gema Jawa (Generasi Muda Jawa).

d) Ikatan keluarga Solo dan lain-lain.

Seiring dengan waktu, orang-orang Jawa yang masuk kedalam paguyuban Pujakesuma bukan sepenuhnya asli memiliki darah Jawa bahkan ada juga orang-orang yang bukan asli orang Jawa. bukan asli orang Jawa dikarenakan orang tua mereka yang beretnis Jawa menikah dengan etnis lain sehingga mereka memiliki identitas sebagai etnis Jawa walaupun tidak sepenuhnya asli orang Jawa. Pujakesuma seiring dengan berkembangnya paguyuban ini menerima orang yang ingin bergabung walaupun bukan orang Jawa, namun mereka biasanya disebut dengan anggota luar biasa.

3. Visi dan Misi Pujakesuma Padang Sidempuan

VISI :

Menciptakan Persatuan dan kesatuan dalam mengayomi serta mewujudkan tatanan kehidupan yang layak bagi warga Pujakesuma.

MISI :

1. Menggalang persatuan dan kesatuan anggota berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
2. Pemberdayakan SDM anggota yang berkualitas secara efektif untuk membangun Pujakesuma.

3. Membangun Kesejahteraan bersama Anggota berdasarkan ekonomi kerakyatan.
4. Memberikan tempat bernaung bagi setiap Warga Pujakesuma
5. Memupuk rasa kepedulian antar warga Pujakesuma melalui seni budaya jawa dan falsafah gotong royong “Sepi ing pamrih, rame ing gawe.

B. Temuan Khusus Hasil Penelitian

1. Preferensi Politik Anggota Pujakesuma DPD Padang Sidempuan dalam pemilihan Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018

Pujakesuma dalam melihat seorang pemimpin harus memiliki jiwa yang kuat serta memiliki dukungan yang besar dan kuat. Oleh karena itu seorang pemimpin harus memiliki jiwa yang kuat dan mempunyai kemampuan yang lebih. Bagi Pujakesuma seorang pemimpin harus memiliki jiwa yang mudah untuk bersosialisasi dikarenakan antara pemimpin dan masyarakat harus terciptanya sebuah harmonisasi agar tidak ada kesenjangan sosial antara masyarakat dan pemimpin.

Menurut Purnadi, selaku ketua dalam organisasi Pujakesuma Padang Sidempuan, kecenderungan paguyuban Pujakesuma dalam melihat kepemimpinan dalam pemilihan Gubernur Sumatera Utara relatif terhadap pandangan setiap anggota Pujakesuma. Jika dilihat dari pasangan yang mencalon menjadi Gubernur Sumatera Utara pada tahun 2018 yaitu pasangan Edy Rahmayadi dengan Musa Rajekshah dan

pasangan Djarot Saipul Hidayat dengan Sihar Sitorus sama-sama memiliki keunggulan nya masing-masing. Namun Pujakesuma sendiri memiliki kriteria dalam memilih seorang pemimpin yaitu dengan melihat visi misi diantara pasangan calon Gubernur Sumatera Utara tersebut.⁴⁴

Pujakesuma bukan merupakan partai politik, tetapi pujakesuma memperbolehkan anggotanya untuk berpolitik. Maka karena itu Pujakesuma mendukung calon pemimpin yang mempunyai komitmen dengan pengembangan Pujakesuma yaitu pasangan calon Djarot Saipul Hidayat dengan Sihar Sitorus. Oleh karena itu Pujakesuma akan berusaha untuk mendukung pemimpin Gubernur Sumatera Utara yang mencalon tersebut.

Ada beberapa sample yang diambil baik dari anggota Pujakesuma maupun dari kalangan masyarakat Jawa yang tidak masuk kedalam organisasi Pujakesuma dalam memilih kandidat Pemilihan Gubernur Sumatera Utara tahun 2018.

Menurut Ahmad Nansi salah satu anggota Pujakesuma, aspirasi politik Pujakesuma berpihak kepada kandidat Djarot Saipul Hidayat dengan Sihar Sitorus dengan alasan sesama etnis Jawa, dan Nansi sendiri mengatakan bahwasanya ia memilih pasangan Djarot Saipul Hidayat dengan Sihar Sitorus. Namun ditekankan lagi Pujakesuma tidak

⁴⁴ Purnadi, Wawancara dengan ketua Organisasi Pujakesuma Padang Sidempuan, Sabtu 17 September 2022 Pukul 14.23 WIB.

memaksakan atau mengharuskan anggotanya untuk memilih pasangan Djarot Saipul Hidayat dengan Sihar Sitorus.⁴⁵

Sugiono, yang merupakan anggota Pujakesuma mengatakan tidak adanya kewajiban untuk memilih pasangan Djarot Saipul Hidayat dengan Sihar Sitorus, itu kembali kepada pihak perseorangan dalam melihat calon pemimpin. Sugiono mengatakan bahwa ia memilih pasangan Edy Rahmayadi dengan Musa Rajekshah dengan alasan seluruh masyarakat bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun.

Masyarakat Jawa yang tidak masuk kedalam organisasi Pujakesuma yaitu Slamet RAK yang ikut serta dalam Pemilihan Gubernur Sumatera Utara mengatakan bahwa ia memilih pasangan Edy Rahmayadi dengan Musa Rajekshah dengan alasan memilih pemimpin tidak harus berdasarkan sesama etnis melainkan dilihat dari kemampuan dan kesiapan kandidat tersebut untuk menjadi seorang pemimpin.⁴⁶

Pendapat berbeda dipaparkan oleh Triadi yang merupakan masyarakat Jawa di Padang Sidempuan. Triadi merupakan masyarakat Jawa yang memilih pasangan calon Djarot Saipul Hidayat dengan Sihar Sitorus dengan alasan sesama etnis harus saling membantu. Dikarenakan mereka merupakan masyarakat pendatang maka mereka harus saling

⁴⁵ Ahmad Nansi, Wawancara dengan anggota Pujakesuma Padang Sidempuan, 31 Desember 2022 Pukul 10.14 WIB.

⁴⁶ Slamet RAK, Wawancara dengan Masyarakat Jawa di Padang Sidempuan, 28 Desember 2022 Pukul 11.25 WIB.

membantu dalam segala aspek terutama apabila mereka sesama etnis Jawa.⁴⁷

Beberapa pendapat tersebut ada perbedaan dalam melihat atau memilih seorang pemimpin dalam Pemilihan Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018. Walaupun demikian adanya perbedaan antara anggota Pujakesuma dalam memilih kandidat pemimpin bukan berarti Pujakesuma terpecah belah ataupun adanya Dualisme. Dapat dipahami bahwa Organisasi Masyarakat Pujakesuma tidak menekankan anggotanya untuk memilih calon kandidat yang beretnis Jawa, mereka dibebaskan untuk memilih kandidat siapa yang mereka anggap layak untuk dijadikan seorang pemimpin.

2. Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan Pujakesuma dalam menentukan dukungan pada pemilihan Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018

Pujakesuma tentunya memiliki faktor dalam mendukung pasangan calon Gubernur Sumatera Utara yaitu Djarot Saipul Hidayat dengan Sihar Sitorus, adapun faktor nya yaitu :

a. Orang Jawa asli

Pujakesuma merupakan organisasi yang lebih mengutamakan sesama etnis mereka. Alasannya dikarenakan mereka merupakan etnis pendatang yang berasal dari Jawa dan merantau ke Sumatera

⁴⁷ Triadi, Wawancara dengan Masyarakat Jawa di Padang Sidempuan, 26 Desember 2022 Pukul 16.41 WIB.

Utara. Maka karena itu Pujakesuma lebih mementingkan sesama etnis mereka karena menganggap orang Jawa merupakan keluarga mereka dan harus didukung apabila membutuhkan dukungan. Jika bukan mereka yang membantu sesama etnis siapa lagi.

- b. Memiliki komitmen untuk memajukan dan mengembangkan Pujakesuma yang ada di Sumatera Utara.

Seperti yang di katakan oleh Bapak Purnadi S.E, pasangan Djarot Saipul Hidayat dengan Sihar Sitorus telah menjanjikan apabila mereka menduduki kursi pada pemilihan Gubernur Sumatera Utara tahun 2018, mereka akan mengembangkan Pujakesuma di Sumatera Utara. Maka karena itu Organisasi Pujakesuma berupaya untuk memenangkan pasangan calon Djarot Saipul Hidayat dengan Sihar Sitorus. Namun apa boleh buat jika tidak menang, yang penting sudah berusaha. Ujar bapak Purnadi S.E.

Pasangan yang mencalon Gubernur Sumatera Utara dengan nomor urut 1 yaitu pasangan Edy Rahmayadi dengan Musa Rajekshah didukung dari partai PAN, PKS, NASDEM, GOLKAR, HANURA, DAN GERINDRA. Sedangkan pasangan dengan nomor urut 2 yaitu Djarot Saipul Hidayat dengan Sihar Sitorus di dukung dari partai PDIP dan PPP.

Hasil pemungutan suara yang dilakukan oleh KPU kota Padang Sidempuan pada tanggal 27 Juni 2018 menyatakan kemenangan diperoleh pasangan nomor urut 1 yaitu Edy Rahmayadi

dengan Musa Rajekshah dengan presentasi kemenangan sebagai berikut :

Tabel 3.

Rekapitulasi hasil perhitungan suara PILKADA kota Padang Sidempuan tahun 2018.

NO	NAMA CALON GUBERNUR SUMATERA UTARA TAHUN 2018	NOMOR URUT	PEROLEHAN SUARA	PERSEN
1.	Edy Rahmayadi & Musa Rajekshah	01	85.930	84,73 %
2.	Djarot Saipul Hidayat & Sihar Sitorus	02	15.476	15,27 %
3	JUMLAH SUARA SAH		101.406	100%

Sumber: Keputusan Komisi Pemilihan Umum.

Pujakesuma sendiri sudah berupaya untuk memenangkan calon Djarot Saipul Hidayat dengan Sihar Sitorus. Mereka sudah berperan dalam memenangkan pasangan tersebut. Adapun peran pujakesuma dalam Pemilihan Gubernur Sumatera Utara untuk memenangkan pasangan Djarot Saipul Hidayat dengan Sihar Sitorus yaitu setiap anggota Pujakesuma diperintahkan untuk mengajak masyarakat lain untuk memilih pasangan Djarot Saipul Hidayat dengan Sihar Sitorus.

Jumlah anggota Pujakesuma berkisar 1.560 orang. Adapun presentase pujakesuma Padang Sidempuan dalam memenangkan pasangan

Djarot Saipul Hidayat dengan Sihar Sitorus sekitar 15% atau sekitar 245 orang dari jumlah anggota pujakesuma.

3. Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Preferensi Politik Pujakesuma di Padang Sidempuan Dalam Pemilihan Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018

Preferensi politik Pujakesuma di Padang Sidempuan terdapat Politik Identitas yang terjadi. Dukungan politik yang diberikan Pujakesuma di Padang Sidempuan pada pemilihan Gubernur Sumatera Utara tahun 2018 yaitu pasangan Djarot Saipul Hidayat yang merupakan etnis Jawa dan beragama Islam dan wakilnya Sihar Sitorus yang merupakan agama non-muslim. Politik identitas yang terjadi yaitu antara etnis dan agama.

Politik identitas dalam pandangan Islam terlebih dahulu dilihat berdasarkan Al-Quran dan Hadist, dikarenakan hukum yang paling tinggi di dalam agama Islam yaitu Al-Quran dan Hadist. Adapun politik Identitas dalam Al-Quran merupakan istilah-istilah Al-Quran yang berkaitan dengan politik identitas dalam dunia perpolitikan. Namun politik identitas tidak secara jelas di jelaskan di dalam Al-Quran, melainkan hanya istilah-istilah yang mengisyaratkan tentang politik identitas dalam perpolitikan.

Adapun syarat-syarat menjadi pemimpin dalam Islam menurut Imam Al-Mawardi yaitu:

1. Adil,

2. Berilmu
3. Sehat jasmani
4. Cerdas
5. Memiliki kemampuan untuk memimpin
6. Berani berkorban untuk mempertahankan kehormatan dan berjihad dengan musuh

Adapun Abdul Qadir Audah menetapkan syarat menjadi pemimpin yaitu:

1. Islam

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاتًا وَيَحَذِّرْكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ الْمَصِيرُ

Artinya: Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. (Q.S. Ali-Imron, 28).⁴⁸

2. Pria
3. Taklif
4. Ilmu pengetahuan
5. Adil
6. Kemampuan dan kecakapan
7. Sehat jasmani dan rohani
8. Keturunan Quraisy

⁴⁸ Al-Quran Surah Ali-Imran Ayat 28

Dalam Al-Quran banyak ditemukan istilah yang mengisyaratkan tentang politik identitas, namun dilihat dari yang sudah terjadi politik identitas biasanya terjadi mengenai pemimpin harus beragama muslim atau non-muslim, pemimpin harus laki-laki atau perempuan, serta pemimpin harus berasal dari suku dan rasnya masing-masing. Maka akan dibahas satu persatu mengenai politik identitas yang sudah terjadi.

a. Realisasi pemimpin Muslim dan Non-muslim

Dalam hal pemimpin pada masa Rasulullah mengharuskan bahwa pemimpin harus merupakan dari golongan muslim. Dijelaskan dalam surah Al-Maidah ayat 51.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ ۚ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ

مِّنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu); sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. Barangsiapa diantara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, Maka Sesungguhnya orang itu Termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.⁴⁹

Berdasarkan dari setiap pemerintahan atau Negara tidak mengharuskan pemimpin dari golongan muslim ataupun non-muslim dikarenakan setiap Negara berbeda dalam peraturan pemerintahannya. Begitu pula jika di terapkan di Negara Indonesia pasti sangat berbeda dengan masa Rasulullah, karena Negara Indonesia bukan merupakan Negara Islam melainkan Negara Demokrasi.

⁴⁹ Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 51

b. Realisasi pemimpin perempuan

Realisasi mengenai pemimpin perempuan dijelaskan dalam QS. An-Nisa ayat 34, yaitu:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. (QS. An-Nisa: 34).⁵⁰

Dalam surah al-Nisa ayat 34 ini tidak ada kata-kata yang melarang wanita menjadi seorang pemimpin. Yang ada hanya pemberitaan Allah SWT, bahwa laki-laki itu pemimpin bagi seorang perempuan atau istri. Jadi dalam ayat ini tidak ada larangan perempuan menjadi pemimpin masyarakat.

c. Realisasi pemimpin agama, suku, ras dan antar golongan.

Melihat fenomena yang terjadi di negara Indonesia, politik identitas sangat mewarnai perpolitikan di Negara Indonesia, karena merupakan cara untuk mencapai tujuan. Misalnya agama, suku, etnis,

⁵⁰ Al-Quran Surah An-Nisa ayat 34

dan ras dipakai sebagai senjata atau alat untuk mencapai tujuan, tanpa adanya pertimbangan.

Dalam hal ini pastinya al-Qur'an akan meluruskan masalah-masalah yang terjadi dalam politik identitas. Disebutkan secara keragaman etnis manusia dalam Al-Qur'an, Al-Qur'an juga menyebutkan perbedaan bangsa-bangsa dan suku-suku yang menunjukkan pengakuan terbuka Islam terhadap keragaman etnis dan budaya manusia. Di jelaskan dalam QS. Al-Hujurat ayat 13 yaitu:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ
أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. QS. Al-Hujurat ayat 13.⁵¹

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah menciptakan manusia dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikannya berbangsa-bangsa, bersuku-suku, dan berbeda-beda warna kulit bukan untuk saling mencemooh, melainkan supaya saling mengenal dan tolong menolong. Allah tidak menyukai orang-orang yang memperlihatkan kesombongan dengan keturunan, ataupun kekayaan karena yang paling mulia di antara manusia di sisi Allah SWT hanyalah orang yang paling bertakwa kepada-Nya. Kebiasaan manusia

⁵¹ Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 13

selalu memandang harkat martabat itu selalu ada sangkut-pautnya dengan kebangsaan dan kekayaan. Padahal menurut pandangan Allah SWT, orang yang paling mulia itu adalah orang yang paling bertakwa kepada-Nya.⁵²

Kesimpulan dari berbagai ayat di atas menjelaskan bahwa Al-Quran tidak melarang seseorang beridentitas dalam mencapai tujuan dalam berpolitik, namun dengan syarat-syarat di antaranya adalah tidak merugikan satu sama lain, maksudnya tidak saling sikut-menyikut, tidak saling menjatuhkan atau mengolok-olok, tidak boleh menggunakan dengan cara kekerasan (Rasialisme), membedakan golongan satu dengan yang lainnya, suku maupun ras (Fanatisme etnis). Tetapi tidak diperbolehkan, jika syarat-syarat di atas tidak di gunakan.

larangan untuk beridentitas, jadi disilahkan untuk beridentitas, asalkan sesuai norma-norma yang di jelaskan dalam ayat-ayat Al-Qur'an yang sudah terpapar di atas.

⁵² *Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, Tafsir Ringkas* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2015), hlm. 1789

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan maka penulis menarik kesimpulan:

1. Preferensi Politik DPD PKB Pujakesuma Padang Sidempuan dalam Pemilihan Gubernur Sumatera Utara tahun 2018 secara Organisasi lebih mendukung pasangan calon Djarot Saipul Hidayat dengan Sihar Sitorus. Namun pengurus tidak memaksakan ataupun mengharuskan anggota Pujakesuma untuk memilih pasangan tersebut. Presentasi DPD Pujakesuma dalam memenangkan pasangan Djarot Saipul Hidayat dengan Sihar Sitorus berjumlah 245 orang atau 15% dari jumlah anggota Pujakesuma. Sehingga banyak ditemukan anggota Pujakesuma yang tidak memilih pasangan tersebut dengan alasan kegamaan. Hal ini disebabkan pula Organisasi Pujakesuma masih menerapkan asas-asas dalam Pemilihan Kepala Daerah yaitu asas bebas. Bebas dalam menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun.

Adapun Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan Pujakesuma dalam mendukung pasangan calon Djarot Syaiful Hidayat dengan Sihar Sitorus, secara organisasi Pujakesuma lebih mengutamakan sesama etnis yaitu etnis Jawa, dan mereka membuat kontrak politik dengan menjanjikan apabila mereka menduduki kursi pada Pemilihan

Gubernur Sumatera Utara tahun 2018 mereka akan memajukan Organisasi Pujakesuma khususnya di Provinsi Sumatera Utara.

2. Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Preferensi Politik Pujakesuma di Padang Sidempuan Dalam Pemilihan Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018 dikaitkan dengan identitas politik yang terjadi. Dalam tinjauan fiqih siyasah ada beberapa ulama yang memperbolehkan dan ada pula yang melarang. Ulama yang memperbolehkan non-muslim menjadi seorang pemimpin dengan alasan apabila mereka bisa bersikap adil. Sedangkan ulama yang melarang non-muslim menjadi seorang pemimpin dengan alasan dapat merusak tatanan kehidupan bernegara bahkan bertentangan dengan nilai kemanusiaan serta keadilan

B. Saran

Adapun saran yang dapat peneliti berikan setelah melakukan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Peneliti menyarankan kepada para calon Gubernur agar bersikap sportif dan tidak ada memihak dan menjanjikan sesuatu hal.
2. Kepada Pujakesuma agar memilih secara adil dengan melihat kualitas calon yang akan dipilih, bukan semata-mata karena Etnis, Ras, dan juga komitmen atau janji yang diberikan oleh Para Calon.

DAFTAR PUSTAKA

- Ade Kosasih, "Menakar Pemilihan Umum Kepala Daerah Secara Demokratis"
Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam, Vol. 2 No. 1, 2017
- Agus prasetya, "Preferensi Politik Pada Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) di Kota Madiun", *Jurnal pamator*, Vol. 11 No. 2, Tahun 2018
- Ahmad khoirul fata, "Kepemimpinan Dalam Perspektif Pemikiran Politik Islam",
Jurnal Review Politik, Vol. 2 No. 1 Tahun 2012
- Ahmad Nansi, Wawancara dengan anggota Pujakesuma Padang Sidempuan, 31 Desember 2022 Pukul 10.14 WIB.
- Ainun najib, "Kontruksi Pemimpin Ideal Untuk Indonesia", *Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 3 No. 1 Tahun 2013
- Al-Quran Surah Ali Imran Ayat 28 Tentang Memilih Pemimpin.
- Al-Quran Surah An-Nisaa Ayat 34 Tentang Pemimpin Perempuan
- Al-Quran Surah Al-Maidah Ayat 51 Tentang pemimpin Muslim dan Non-Muslim
- Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 Tentang perbedaan Suku, Ras dan Agama.
- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006
- Andi Mappiare, *Psikologi Orang Dewasa Bagi Penyesuaian Dan Pendidikan* Surabaya: Usana Offsetprinting, 1994
- Arsyad Sobby Kesuma, "Pandangan Ulama Tentang Kepemimpinan Dalam Islam", *Jurnal Islamica*, Vol. 4 No. 1 Tahun 2019
- Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, Tafsir Ringkas, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2015.
- BPS Provinsi Sumatera Utara, *Provinsi Sumatera dalam Angka*, Medan : CV Rilis Grafika, 2019
- BPS Padangsidimpuan Tahun 2018
- Carol C. Gould, *Demokrasi Ditinjau Kembali*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994

- Dani Syahpani, "Makna Pemimpin Menurut Orang Jawa (Studi Deskriptif Pada Paguyuban Pujakesuma)", *Skripsi*, Medan: Universitas Sumatera Utara, 2009
- Dede Rosyada, Dkk, *Demokrasi, Hak Asasi dan Masyarakat Madani*, Jakarta: Prenada Media, 2000
- Dede Rosyada, Dkk, *Demokrasi, Hak Asasi....*,
- Dede Rosyada, Dkk, *Demokrasi, Hak Asasi....*,
- Dharma kelana putra, "Relevansi politik identitas pemilih muslim dalam pemilihan guberbur sumatera utara tahun 2018", *Jurnal antropologi: isi-isu sosial budaya*, Vol. 21 No. 02, Tahun 2019
- Dwi siswanto, *Orientasi Pemikiran Filsafat Sosial*, Yogyakarta: Penerbit Lima, 2009
- Fran Magniz suseno, *Etika Jawa Sebuah Analisa Falsafi Tentang Kebijakan Hidup Orang Jawa*, Jakarta: PT.Gramedia pustaka utama, 1985
- Hendra Nurtjahthjo, *Filsafat Demokrasi*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006
- <https://medan.tribunnews.com/2018/05/23/persaudaraan-jawa-bataktegaskanmenangkan-djarot-sihar>
- Ismid Hadad, *Budaya Politik Dan Keadilan Sosial*, Jakarta: LP3ES, 1979
- Ishiyama J dan Marijeke Breuning, *Ilmu Politik Dalam Paradigma Abad Ke-21 jilid 1*, Jakarta: Kencana prenada media group, 2013
- Junaidi, "Perilaku Komunikasi Etnis Jawa dalam Kehidupan Sosial dan Kehidupan Politik di kota Medan", *Skripsi* (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara)
- Josep A. Scumpeter, *Capitalis, socialism & Democracy*, Raja grafindo Persada : Jakarta, 2011
- Kasim siyo, *WONG JAWA DISUMATERA, sejarah, Budaya, Filosofi & Interaksi Sosial* Pujakesuma, Jakarta: 2008
- Koentjaningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta: Aksara Baru, 1979
- Lexy J, Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1984

- Maghfira Faraidiany, Heri Kusmanto dan Warjio, "Politik Identitas dalam Iklan Politik dalam Pemilihan Kepala Daerah Sumatera Utara 2018", *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu sosial*, Vol. 11 No 1, tahun 2019
- M. Lutfi Chakim, "Perubahan Sistem Pemilihan Kepala Daerah Dalam Dinamika Pelaksanaan Demokrasi", *Jurnal rechts vinding*, Vol. 3 No. 1., Tahun 2014
- Moh. Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993
- Mujar Ibnu Syarif, *Fiqh Siyash doktrin dan pemikiran politik Islam*, Jakarta: PT. Gelora Aksara, 2008
- Purnadi, Wawancara dengan ketua Organisasi Pujakesuma Padang Sidempuan, Sabtu 17 September 2022 Pukul 14.23 WIB.
- Sahadi, Otong Husni Tufiq, "Karakter Kepemimpinan Ideal Dalam Organisasi", *Jurnal Moderat*, Vol. 6. No. 3 Tahun 2020
- Slamet RAK, Wawancara dengan Masyarakat Jawa di Padang Sidempuan, 28 Desember 2022 Pukul 11.25 WIB.
- Sudjono Sastroatmodjo, *Perilaku Politik* (Semarang: IKIP Semarang Press, 1995)
- Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Bandung: CV Alfabeta, 2012
- Sukur Kolil, *Metodologi Penelitian*, Bandung: Pustaka Media, 2006
- Sun Fatayi, "Relevansi Asas-Asas Pemilu sebagai Upaya Menciptakan Pemilu yang Demokratis dan Berintegritas" *Jurnal Pemikiran Keislaman*, Vol. 28 No. 1, Januari-Juni 2017.
- Triadi, Wawancara dengan Masyarakat Jawa di Padang Sidempuan, 26 Desember 2022 Pukul 16.41 WIB.
- Undang-undang Darurat Nomor 70 Tahun 1956
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-undang Nomor 32 tahun 2004, Pasal 56 Ayat 1 tentang Pemerintahan Daerah

Wahyu wiji utomo, “Budaya Politik dalam Etnis Jawa (Studi Kasus Peran Pujakesuma dalam Pilkada Kabupaten Langkat pada Tahun 2013”, *Skripsi* Medan: Institut Agama Islam Negeri Medan, 2014

Winarno, *Paradigm Baru Pendidikan Kewarganegaraan: Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2014

CURRICULUM VITEA



A. Identitas Pribadi

Nama : Nurhayani Pohan
Nim : 1810300037
Tempat/Tanggal Lahir : Sampean, 10 Deseber 1999
E-Mail/ No. Hp : yanipohan04@gmail.com/ 082213529355
Jenis Kelamin : Perempuan
Jumlah Saudara : 3 (Tiga)
Alamat Lengkap : Lingk. Pekan II Sigambal, Kecamatan
Rantau Selatan, Kab. Labuhanbatu

B. Identitas Orang Tua

Nama ayah : Alm. Barhamsyah Pohan
Pekerjaan : -
Nama ibu : Asmah Simamora
Pekerjaan : Wirausaha
Alamat : Lingk. Pekan II Sigambal, Kecamatan
Rantau Selatan, Kab. Labuhanbatu

C. RIWAYAT PENDIDIKAN

TK : AHMADUS-SHOMADIYAH SIGAMBAL
SD : SD114376 RANTAUPRAPAT (2006-2012)
SLTP : MTSN 1 RANTAU SELATAN (2012-2015)
SLTA : SMA1 RANTAU SELATAN (2015-2018)
S-1 : UNIVERSITAS NEGERI SYEKH ALI HASAN AHMAD
AD-DARRY PADANGSIDIMPUAN

DAFTAR WAWANCARA

1. Bagaimanana sejarah terbentuknya organisasi Pujakesuma dikota padangsidimpuan?
2. Berapa Jumlah Warga Pujakesuma Di Padangsidimpuan?
3. Bagaimana Sikap Pujakesuma Terhadap Politik Identitas?
4. Bagaimana budaya politik dalam organisasi pujakesuma terutama dalam melihat pemimpin dan kekuasaan?
5. Bagaimana peran pujakesuma dalam pemilihan kepala daerah di wilayah kota padangsidimpuan?
6. Apa saja yang menjadi pertimbangan organisasi pujakesuma dalam mendukung salah satu calon kepala daerah?
7. Bagaimana bentuk dukungan yang diberikan organisasi pujakesuma dalam memenangkan pasangan Djarot saiful hidayat dengan Sihar manalu?
8. Apakah organisasi pujakesuma ini mengajak masyarakat yang beretnis jawa untuk memenangkan salah satu calon kepala daerah atau hanya dikalangan organisasi pujakesuma saja?
9. Berapa Persentase Masyarakat Jawa Dalam Memenangkan Pasangan Djarot?
10. Apa Saja Dampak Akibat Tidak Menangnya Pasangan Djarot Dalam Pemilihan Gubernur Tahun 2018?

DOKUMENTASI

Wawancara dengan Ketua Organisasi Pujakesuma Bapak Purnadi, S.E



Wawancara dengan sekretaris pujakesuma dan anggota Pujakesuma yaitu bapak sugiono dan Bapak Ahmad Nansi



Wawancara Dengan Warga Yang Beretnis Jawa Yaitu Bapak Slamet RAK

